



KUDETA MESIR DAN KONFLIK PALESTINA

Gonda Yumitro, S.IP, M.A



 **Gre Publishing**
Road Abroad

Kudeta Mesir dan Konflik Palestina

Penulis : Gonda Yumitro, S.IP, M.A
Design Cover dan Tata Letak : Marwan & Gun

Penerbit
GRE PUBLISHING
Jln. Magelang Km. 3
Gang Margo Agung Karangwaru Lor TR II/417C
Yogyakarta - 55241
<http://grepublishing.com>

Cetakan 2017
ISBN 978-602-7677-39-5

Dilarang keras mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

Buku ini bertujuan untuk mengeksplanasikan pengaruh kudeta militer terhadap masa depan perdamaian Palestina. Hal ini penting dilakukan mengingat kedua isu tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat dimana tarik menarik kepentingan utamanya dari negara *major power* sangat kentara terlihat. Padahal pada aspek kemanusiaan, berbagai peristiwa yang dialami oleh masyarakat Palestina merupakan suatu tragedi besar yang seharusnya tidak terjadi di tengah peradaban yang mengagungkan demokrasi.

Melalui buku ini diharapkan muncul analisa ilmiah yang mampu menjelaskan korelasi kedua isu tersebut dan pembacaan ilmiah terhadap masa depan perdamaian Palestina. Bagi bangsa Indonesia hal ini merupakan suatu yang penting mengingat komitmen bangsa kita untuk menentang segala penjajahan di muka bumi dan mewujudkan perdamaian dunia.

Secara metodologi, buku yang merupakan produk penelitian ini dihasilkan melalui metode *literature review* dan wawancara mendalam. *Literature review* untuk menganalisa berbagai sejarah dan perkembangan kedua isu dari sumber-sumber terpercaya, dan interview dilakukan kepada para pakar yang konsen dengan isu Timur Tengah dan perdamaian. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa jenis data yang digunakan untuk penulisan buku ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara diskripsi kualitatif.

Penemuan yang dihasilkan dalam buku ini diharapkan menjadi informasi penting dan bisa digunakan sebagai referensi bagi berbagai kalangan masyarakat dan lembaga yang ingin

menyikapi isu kudeta Mesir dan konflik Israel Palestina. Hal ini penting mengingat perhatian masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina sangat tinggi, tetapi analisa mendalam tentang persoalan tersebut masih jarang didapatkan.

Terakhir, ucapan terima kasih disampaikan kepada pembaca, penerbit, rekan-rekan dosen di Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Secara lebih khusus, karya ini kami persembahkan untuk istri tercinta, Indah Mila Biyantari dan anak-anakku, mbak Afrah, Alifa, dan Aira yang telah memberikan motivasi dan kesempatan untuk terus berkarya. Semoga karya sederhana ini memberikan manfaat untuk semua. Aamiin.

Malang, November 2017

Gonda Yumitro, M.A

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ iii

Daftar Isi ~ v

BAB 1. PENDAHULUAN: MESIR, AMERIKA DAN KONFLIK PALESTINA ~ 1

- A. Kudeta Mesir dan Politik Amerika ~ 7
- B. Sejarah Konflik Palestina ~ 9
- C. Arab Spring ~ 12

BAB 2. DEMOKRATISASI DAN KUDETA MESIR ~ 17

- A. Mesir Menjelang Demokratisasi ~ 17
- B. Arab Spring dan Perubahan Struktur Politik Mesir ~ 20
- C. Demokratisasi Mesir ~ 21
- D. Bangkitnya Kekuatan Ikhwanul Muslimin ~ 23
- E. Mursi Sebagai Aktor Utama IM Mesir ~ 26
- F. Kebijakan Strategis Mursi ~ 27
- G. Kebijakan Luar Negeri Mursi ~ 27
- H. Mesir – Iran Jadi Akrab ~ 29
- I. Mau Untung Jadi Buntung ~ 30
- J. Penguatan Ekonomi Domestik ~ 33
- K. Kebijakan Kontroversial Mursi ~ 35
 - a. Pelemahan Militer – Pensiunkan Para Jendral ~ 35
 - b. Penguatan Sipil – Konstitusi Baru Mesir ~ 36
 - c. Upaya Islami Mesir ~ 36
 - d. Upaya Mendukung Palestina ~ 37

- L. IM dan Ancaman Kepentingan Amerika ~ 38
- M. Kudeta dan Kekacauan Politik Mesir ~ 39
- N. Peran Amerika dalam Kudeta Mesir ~ 41

BAB 3. NASIB SURAM PERDAMAIAN PALESTINA ~ 45

- A. Akar Persoalan Palestina ~ 45
- B. Perkembangan Konflik Palestina ~ 48
- C. Jalan Peta Damai ~ 50
- D. Hamas Vs Fatah ~ 51
- E. Konflik Palestina Pasca Kudeta Mesir ~ 53

BAB 4. KAITAN KUDETA MESIR DENGAN ISU PALESTINA ~ 59

- A. Sejarah Keterikatan Antara Mesir dan Palestina ~ 59
- B. Camp David dan Suramnya Keamanan Palestina ~ 60
- C. Keterkaitan Hamas dengan IM di Mesir ~ 62
 - a. Isolasi Hamas Post Kudeta Mesir ~ 63
 - b. Kebijakan Morsi dan Keamanan Israel ~ 64
 - c. Keterkaitan Geografis dan Perbatasan ~ 65
 - d. Kudeta Mesir dan Ancaman Keamanan Palestina ~
65

BAB. 5. KESIMPULAN ~ 69

DAFTAR PUSTAKA ~ 71

INDEKS ~ 75

PROFIL PENULIS ~ 77



BAB 1

PENDAHULUAN: MESIR, AMERIKA DAN KONFLIK PALESTINA



Pada tanggal 3 Juli 2013 yang lalu, dunia dikejutkan dengan berita kudeta terhadap Presiden Mesir, Muhammad Mursi, yang dilakukan oleh militer di bawah pimpinan Jenderal Abdul Fatah Al-Sisi. Saat itu, sebelum terpilih melalui pemilu, Jenderal Sisi mengumumkan Adly Mansour sebagai presiden sementara Mesir. Sedangkan Presiden Mursi menjadi tahanan rumah dan pimpinan Ikhwanul Muslimin ditangkap. Setelah itu, pada satu tahun terakhir, media massa diramaikan oleh berita dan perkembangan kondisi Mesir, termasuk berbagai isu kemanusiaan yang terjadi. Hal ini menarik perhatian banyak orang karena Mesir dianggap sebagai salah satu pelopor gelombang demokratisasi di Timur Tengah, tetapi hanya berselang satu tahun setelah pemilihan presiden secara demokratis, kembali dikuasai oleh militer.

Sebenarnya, seperti halnya Pakistan yang selama beberapa dekade dikuasai militer, kudeta bukan merupakan hal asing dalam politik Mesir. Bahkan sejak awal pertama menjadi negara republik, kudeta sudah menjadi warna politik Mesir. Ketika itu, Muhammad Najib mengkudeta Raja Faruq I dan menjadi presiden pertama Mesir pada tahun 1953. Hanya berselang satu tahun, rekan presiden dalam kudeta 1953, Gamal Abdul Naser malah balik mengkudeta dan memenjarakan Muhammad Najib dan berkuasa sampai meninggal. Karenanya

Anwar Saddat bisa dengan leluasa mendapatkan kekuasaan, tetapi dalam perjalannya, ia pun tewas dalam sebuah parade militer karena diserang oleh kelompok radikal. Pasca itu, militer Mesir pun kembali berkuasa dengan duduknya Husni Mubarak sebagai presiden Mesir selama 30 tahun.

Sejarah akhirnya mencatat bahwa pemerintahan Husni Mubarak harus berakhir pada tanggal 11 Februari 2011 setelah demonstrasi rakyat besar-besaran selama 18 hari menuntut turunnya pemerintahan militer yang otoriter. Saat itu rakyat berharap bahwa Mesir akan berubah menjadi negara demokratis baru. Namun, tidak lebih dua tahun setengah dari proses demokratisasi tersebut, militer Mesir kembali berkuasa dengan melakukan kudeta pada bulan Juli 2013 terhadap pemerintahan Muhammad Mursi yang dipilih secara demokratis.

Beberapa pemicu kudeta tersebut adalah karena berbagai kebijakan Mursi yang melemahkan posisi militer dalam politik Mesir. Di antaranya adalah dengan mempersiapkan beberapa jenderal Mesir, dan mendeklarasikan konstitusi baru yang memberikan kekuasaan lebih kuat kepada sipil dalam politik Mesir pada 22 November 2012. Hanya saja, banyak pihak yang menilai bahwa upaya ini dilakukan untuk mengislamisasi Mesir dan dinilai tidak mengakomodir kepentingan semua golongan. Kondisi bertambah sulit karena dalam beberapa aspek, Mursi juga belum mampu memperbaiki stabilitas ekonomi Mesir yang membuat masyarakat pada umumnya merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Gelombang demonstrasi pun meluas di tengah masyarakat Mesir, satu pihak mengkritisi berbagai kebijakan Mursi, tetapi di pihak muncul gelombang demonstrasi pendukung Mursi. Massa yang pada awalnya berlangsung damai menjadi beringas ketika dalam beberapa demonstrasi anggota mereka terbunuh. Kondisi keamanan Mesir pun kian tidak jelas, sehingga Jenderal Abdul Fatah Al-Sisi menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan diambil oleh militer untuk menjaga stabilitas keamanan Mesir pada tanggal 2 Juli 2013.

Kelompok pendukung Mursi tidak menerima keputusan ini dan terus melakukan aksi protes. Menghadapi keadaan

tersebut, militer Mesir yang meng kudeta Mursi pun bertindak semakin keras, bahkan menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi yang berada dibalik setiap gelombang demonstrasi. Karenanya, berbagai kegiatan IM pun diwaspadai, termasuk ketika sholat berjama'ah di masjid-masjid Mesir. Tidak jarang militer menembaki mereka, termasuk anak-anak kecil, wanita dan orang tua. Hal inilah yang menimbulkan berbagai permasalahan kemanusiaan di Mesir dan terus berlangsung sampai sekarang.

Yang menarik adalah, bahwa ternyata belakangan terungkap bahwa kudeta itu ternyata tidak hanya merupakan masalah domestik Mesir, melainkan telah direncanakan oleh Negara Adidaya Amerika sejak lebih setahun yang lalu. Rencana ini didukung dan digerakan oleh beberapa unsur: Kaum Liberal Mesir, Kaum Minoritas Nasrani Koptik, Orang-Orang Husni Mubarak, dan Kaum Minoritas Syiah. Kudeta itu direstui dan didukung oleh 5 negara, khususnya secara penuh oleh Israel¹. Bahkan juga terungkap (24 Juli 2013) bahwa Gereja punya peran dalam menahan dan memenjarakan Presiden Muhammad Mursi. Lebih dari itu, juga diketahui bahwa Dr. Muhammad El-Baradei (yang istrinya seorang wanita pengikut aliran Syiah)² meminta dukungan Yahudi Amerika terhadap kudeta Mesir dengan imbalan di antaranya "konsisten dengan perjanjian Camp David 1978 (perjanjian damai antara Mesir dan Israel)"³. Dan masih banyak informasi lainnya yang mencengangkan.

Realita ini menunjukkan bahwa kudeta Mesir bukanlah tindakan reaksioner yang berkembang begitu saja di tengah masyarakat, melainkan merupakan suatu peristiwa yang sangat sistematis dan rapi dan menyimpan banyak kepentingan. Dalam kaitannya dengan masalah perdamaian Palestina, petunjuk semakin jelas dengan bocornya pernyataan senator Amerika Mark Kirk dengan terang-terangan menyampaikan perlunya intervensi Amerika dalam politik Mesir. Ia menggambarkan

¹<https://www.middleeastmonitor.com/articles/africa/7727-why-is-israel-supporting-the-egyptian-coup>

² <http://www.islammemo.cc/akhbar/locals-egypt/2013/07/11/176120.html>

³ <http://www.islammemo.cc/akhbar/locals-egypt/2013/07/16/176470.html>.

bahwa kepemimpinan kelompok Islamis di Mesir akan menjadi ancaman bagi politik dan kepentingan Amerika. Dalam pidatonya, ia mengindikasikan pemerintah Amerika perlu melakukan segala upaya (termasuk kudeta, red.) untuk mempertahankan kepentingan Amerika di Mesir.

Beberapa kepentingan Amerika di Mesir terlihat dari potongan pidatonya yang diterjemahkan:

Apakah kita berharap bahwa Mesir yang dipimpin kelompok Islamis mencegah masuknya senjata sampai ke Hamas? Akankah Mesir pimpinan Islamis membantu menjaga kemerdekaan Sudan Selatan? Akankah Mesir pimpinan kelompok Islamis melindungi Kristen Koptik yang terus berkembang bahkan telah mencapai sekitar sepuluh persen dari total penduduk? Akankah pimpinan Mesir yang Islamis melakukan apa yang kita inginkan dengan lebih dari \$ 1 miliar bantuan yang tiap tahun kita berikan? Apakah mereka akan terus berbagi intelijen dan bekerja dengan AS melawan terorisme? Ini semua adalah pertanyaan yang akan dihadapi oleh Amerika Serikat dalam waktu dekat⁴.

Dari salah satu poin kepentingan tersebut, maka kita mendapatkan suatu Indikasi bahwa Amerika tetap menjadi teman setia bagi Israel, dan berusaha untuk mengamankan posisi negara sekutu dekatnya ini⁵. Secara logika sederhana, maka keberadaan Israel di Timur Tengah berdasarkan perkembangan isu kawasan, menjadi indikasi sulitnya posisi bangsa Palestina. Bahkan muncul beberapa analisa bahwa kembali berkuasanya kelompok militer di Mesir akan semakin memperlemah posisi Hamas di Palestina⁶. Padahal sejauh ini, Palestina merupakan

⁴https://www.youtube.com/watch?v=w58LsqrSYwA&feature=youtube_gdata_player

⁵ <http://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/egypt-us-support-for-military-coup/>

⁶ <http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/07/29/egypt-hamas-israel-peace/2587057/>

salah satu isu sentral. Selain telah berlangsung lama, konflik ini menyebabkan korban yang tidak sedikit.

Setidaknya puluhan ribu masyarakat terbunuh dan terluka termasuk anak-anak dan wanita, ratusan ribu infrastruktur seperti rumah dan fasilitas umum – masjid, sekolah, dan rumah sakit – hancur, 600 ribu penduduk Palestina pernah dimasukkan ke penjara Israel, serta lebih dari 4,6 juta penduduk Palestina menjadi pengungsi. Belum termasuk akibat psikis serta ekonomi dan keterbatasan komunikasi yang membuat sendi-sendi kehidupan masyarakat Palestina terganggu (*Palestine times*, no. 83, May 1998). Suatu kondisi tragis dan melukai rasa kemanusiaan. Demikian juga secara wilayah, tanah Palestina menjadi semakin menyempit dan terpisah akibat pencaplokan yang dilakukan oleh Israel. Bahkan jika diperhatikan polanya, konflik tersebut terus berlangsung, termasuk setelah terjadinya kudeta Mesir 2013. Isu terkini yang terjadi adalah serangan selama satu bulan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina pada bulan Ramadhon tahun 2014 ini.

Memperhatikan realita tersebut, terjadi perdebatan panjang dalam memprediksi masa depan perdamaian Palestina, mengingat munculnya beberapa solusi untuk mewujudkan kawasan timur tengah yang damai, sebagaimana juga diusung oleh bangsa Indonesia dalam politik Internasional. Namun demikian, cukup banyak pihak yang pesimis dengan lahirnya perdamaian di bumi Palestina mengingat beberapa realita yang berkembang, terutama dalam kaitannya dengan perubahan struktur politik akibat kudeta militer di Mesir. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat Israel sebagai musuh bangsa Palestina merupakan aktor penting yang mendukung kudeta di Mesir⁷. Selain itu, berbagai data juga menunjukkan bahwa Amerika sebagai sekutu dekat Israel melakukan banyak hal untuk menggulingkan kekuasaan kelompok islamis di Mesir⁸.

⁷ <https://www.middleeastmonitor.com/articles/africa/7727-why-is-israel-supporting-the-egyptian-coup>

⁸ <http://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/egypt-us-support-for-military-coup/>

Berbagai rasionalitas tersebut bisa diterima dalam pandangan realisme dunia Hubungan Internasional.

Dalam asumsi penulis, dengan berkuasanya kembali kelompok militer, maka posisi Israel akan semakin kuat, dan pada waktu yang sama memperlemah posisi bangsa Palestina. Hal ini dikarenakan dukungan yang bisa diberikan oleh dunia Islam dan pergerakan masyarakat Palestina melalui Mesir akan semakin sulit karena aliansi yang kuat dari pemerintah Mesir dengan Israel dan Amerika. Pada waktu yang sama, dengan lemahnya kekuatan Ikhwanul Muslimin di Mesir, maka hal tersebut juga akan mempersulit gerak kelompok Hamas yang juga merupakan cabang IM di Palestina. Selain itu, kudeta Mesir juga mempunyai implikasi domino terhadap belahan dunia Islam lainnya sehingga memperlemah posisi dan komitmen mereka untuk perhatian dan berempati dengan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Palestina. Pada saat yang sama, Israel pun semakin kuat dan terus didukung oleh Amerika yang semakin optimal mendapatkan keuntungan dari perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah.

Untuk membuktikan asumsi tersebut penulis melakukan dua metode pengumpulan data, yaitu:

(1) Kajian Literatur

Data kajian literatur berasal dari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu kudeta Mesir dan perkembangan konflik Israel palestina. Selain itu terdapat dokumen sekunder yang mencakup hasil-hasil penelitian atau laporan yang telah dihasilkan oleh berbagai lembaga penelitian mengenai berbagai isu yang berkembang di Timur Tengah, khususnya berkaitan dengan kudeta Mesir 2013 dan masalah Palestina.

(2) *Indepth Interview*

Metode interview mendalam dibutuhkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai persepsi dan

motivasi seseorang. Oleh sebab itu, metode ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai data asli yang berasal dari pandangan para informan yang akan diwawancarai. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada para pakar dalam bidang kajian timur tengah. Pengumpulan data untuk penulisan buku ini menggunakan analisa secara kualitatif. Oleh sebab itu, proses pengumpulan data untuk buku ini bersifat dinamis dan berkembang.

A. KUDETA MESIR DAN POLITIK AMERIKA

Kudeta adalah upaya dari militer untuk menguasai pemerintahan dikarenakan pemerintahan sebelumnya terutama sipil dinilai tidak mampu mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara agar adanya stabilitas politik⁹. Meskipun dilakukan oleh kelompok militer, seringkali kudeta juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan asing di Negara bersangkutan. Biasanya, ketika terjadi kudeta pada suatu Negara, maka rasa keamanan yang muncul di tengah masyarakat mulai akan berkurang sampai terwujud stabilitas politik dari pemerintahan yang baru. Padahal bicara tentang fungsi pemerintahan, maka pada dasarnya semua rakyat menginginkan munculnya perdamaian yang dijamin oleh pemerintah yang berkuasa. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa karena berbagai kepentingan, tidak semua orang atau kelompok menginginkan perdamaian karena terkadang konflik bisa memberikan keuntungan bagi segelintir orang yang lainnya.

Hal ini misalnya bisa terlihat dari perkembangan rangkaian konflik yang terjadi di kawasan timur tengah. Karena dalam hal kekayaan alam, sebagian besar negara-negara Islam berada di sekitar garis khatulistiwa yang terkenal kesuburan dan potensi tambangnya, maka mereka seperti gadis cantik yang menarik siapapun. Adapun dalam hal penduduk, setiap wanita muslim rata-rata melahirkan tiga anak. Berbeda dengan wanita

⁹ Nikolay Marinov And Hein Goemans, *Coups and Democracy*. B.J.Pol.S., Page 1 of 27 Copyright r Cambridge University Press, 2013

barat yang dari dua orang wanita rata-rata hanya melahirkan satu anak. Dengan potensi tersebut dan kekuatan negara-negara berkembang yang relatif lemah, mereka seringkali dieksploitasi oleh Barat, terutama Amerika Serikat. Berbagai upaya mereka lakukan untuk meraih kepentingannya, termasuk dalam mempengaruhi posisi kepemimpinan negara.

Artinya, meskipun pada dasarnya kudeta bukan secara natural diinginkan, tetapi terkadang ada unsur kepentingan dari berbagai pihak yang menuntut terjadinya kudeta yang pada awalnya tidak diharapkan. Berkaitan dengan kudeta Mesir 2013, dalam pidatonya, Obama menyatakan tidak terlibat dalam kudeta Mesir, tetapi data menunjukkan bahwa dana dalam jumlah banyak dikirimkan Amerika untuk mendukung kelompok oposisi Mursi. Demikianlah politik Amerika yang pragmatis dan *double standard*. Padahal belakangan terbongkar bahwa Amerika merupakan aktor yang membiayai kudeta Mesir. Hal ini bisa terlihat dari tulisan Emad Mekay yang berjudul *In the name of democracy, U.S. works against Morsi*¹⁰. Emad adalah seorang jurnalis Mesir yang bekerja untuk melakukan laporan investigasi terkait masalah Mesir yang dilakukan oleh UC Berkeley. Dalam karyanya, ia menemukan bahwa Amerika telah mengeluarkan banyak uang kepada kelompok-kelompok oposisi untuk menggulingkan pemerintahan Mohammad Mursi. Gerakannya sangat rapi karena juga didukung oleh kelompok militer yang bekerjasama dengan berbagai NGO, kelompok liberal dan Kristen koptik Mesir.

Di antara mereka yang mendapatkan bantuan dana tersebut adalah Esraa Abdel Fattah yang merupakan pendiri partai oposisi Mesir yang dipimpin oleh Mohammad El Baradei. Ia mendapatkan dana dari *the National Endowment for Democracy* sebesar \$75,000. Belum termasuk dana yang didapatkannya dari *the Middle East Partnership Initiative* dan *the National Democratic Institute*. Organisasi inilah yang menggerakkan banyak massa untuk memprotes pemerintahan Mursi dan menyebabkan jatuhnya banyak korban pada

¹⁰ <http://www.sfgate.com/opinion/openforum/article/In-the-name-of-democracy-U-S-works-against-Morsi-4742221.php>

Desember 2012. Namun ia yang menyebut diri sebagai aktifis demokrasi mendekati kepada militer dan melakukan lobi kepada Washington untuk tidak menyebut penggulingan Mursi sebagai kudeta¹¹.

Selain itu, Amerika juga memberikan dana kepada anggota parlemen, kelompok Kristen koptik Mesir, polisi dan berbagai instrument kehidupan bernegara strategis lainnya. Di antara yang menerima dana tersebut adalah Mohammed Essmat Al-Sadat melalui lembaga *Sadat Association for Social Development* yang ia bangun sebesar \$84,445. Demikian juga Michael Eunir selaku pimpinan Kristen koptik Mesir yang pada tahun 2011 saja telah menerima dana dari USAID sejumlah \$873,355. Sebagai imbalannya, maka kedua orang ini dengan lembaganya terlibat aktif dalam kelompok politisi yang menggerakkan protes terhadap Mursi pada tanggal 30 Juni 2013 yang lalu. Dan masa banyak elite dan kelompok lainnya yang menerima dana dari lembaga-lembaga Amerika seperti the *Bureau for Democracy, Human Rights and Labor (DRL)*, *The Middle East Partnership Initiative (MEPI)*, *USAID*, dan berbagai *quasi-governmental organisation the National Endowment for Democracy (NED)* ini¹².

B. SEJARAH KONFLIK PALESTINA

Konflik Palestina telah berlangsung sejak tahun 1948. Pada awalnya ketika berada dalam kekuasaan Islam, negeri para nabi ini sebagian besarnya berada dalam keadaan aman dan tanpa konflik berkepanjangan. Namun sejak semakin lemahnya kekuatan Islam dan kolonialisasi yang terus berkembang, perbedaan keyakinan yang ada di tengah masyarakat menjadi alat pemicu konflik yang cukup strategis. Melalui deklarasi Balfour, Inggris “memberikan” tanah Palestina kepada bangsa Yahudi. Dengan cara ini, Inggris ingin mengurangi persoalan

¹¹ <http://www.middleeastmonitor.com/news/americas/6554-us-documents-show-that-washington-funded-military-coup-in-egypt#sthash.RSxx9cyd.dpuf>

¹² <http://www.indybay.org/newsitems/2013/07/11/18739654.php>

domestik yang terjadi di negaranya akibat ulah orang-orang Yahudi. Maklum, bangsa Yahudi terkenal pintar, tetapi sering membuat masalah. Akibatnya di berbagai negara mereka tidak disukai. Tetapi dengan kondisi itu pula mereka mampu membuat cerita-cerita fiktif yang membuat orang lain menjadi simpatik, misalnya kasus diskriminasi kaum Yahudi di Turki, Eropa dan Kolumbia.

Pada masa inilah, doktrin-doktrin keagamaan Yahudi sering didengungkan. Bagi kaum Yahudi yang mengklaim diri sebagai orang pilihan (*the chosen people*), tidak ada jalan untuk menyelamatkan generasi mereka kecuali dengan kembali ke tanah yang telah dijanjikan (*the promised land*). Bagi mereka, kejayaan kerajaan Nabi Sulaiman 'alaihi salam perlu dikembalikan, di mana bekas-bekasnya terletak di bawah Masjid Al-Aqsa. Orang-orang Yahudi pun berbondong-bondong kembali ke tanah Palestina. Bahkan ketika sudah semakin kuat, pada tahun 1948, bangsa Yahudi pun mendeklarasikan berdirinya negara Israel.

Konflik Palestina pun berkembang menjadi konflik regional bahkan internasional. Pada saat itu, beberapa kali terjadi perang antara bangsa Arab dengan Israel dan sekutunya, meskipun selalu dimenangkan oleh bangsa Yahudi. Akhirnya, posisi Israel pun semakin kuat, tetapi tetap meninggalkan masalah karena posisi strategis yang dimilikinya. Palestina berada di kawasan Timur Tengah yang menghubungkan benua Asia, Eropa dan Afrika, dan juga merupakan tempat suci bagi tiga agama samawi. Umat Islam mempunyai masjid Al Aqsa sebagai tempat Rasulullah pernah ber-Isra', kaum Nasrani mempunyai Betlehem sebagai tempat kelahiran Nabi Isa 'alaihi salam, dan kaum Yahudi mengklaim tembok ratapan sebagai peninggalan para nabi mereka. Kondisi ini membuat konflik Israel terus berlangsung, bahkan meluas menjadi konflik agama.

Salah satu bukti kuatnya posisi Israel di kawasan timur tengah, terutama dalam hubungannya dengan pemerintahan Mesir dan Palestina adalah dengan kelahiran perjanjian Camp David pada tahun 1978. Perjanjian camp

David merupakan perubahan arah politik Mesir pada masa Anwar Sadat yang memperlemah posisi Mesir dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Padahal sebelumnya, Gamal Abdul Natsir begitu menunjukkan permusuhan kental dengan Israel, Amerika dan negara kolonial lainnya dengan mendirikan Pan-Arabism. Oleh bangsa Arab ia dianggap sebagai pembawa kejayaan dan kebebasan yang mampu membangkitkan identitas mereka.

Nasser bahkan mampu membangun komunikasi intens dengan beberapa negara Arab dalam menentukan sikap mereka terhadap Israel. Mereka menyepakati bahwa tidak boleh ada satu negara Arab pun yang mengakui Israel sebagai negara, serta tidak boleh ada perdamaian dan negosiasi dengan Israel. Ia mampu memunculkan permusuhan dengan bangsa Israel sebagai bangsa non Arab di kawasan timur tengah. Apalagi Israel dinilai sebagai perebut wilayah bangsa Arab (baca Palestina). Bahkan ia segera menggerakkan bangsa Arab untuk memerangi Israel. Paling tidak beberapa peperangan besar terjadi pada waktu itu seperti perang tahun 1948 dan perang enam hari tahun 1967 melawan Israel.

Amerika tentu tidak menyukai Mesir pada masa ini. Apalagi Natsir menunjukkan kedekatannya dengan Uni Soviet. Pada waktu itu, Soviet yang merupakan musuh Amerika dalam perang dingin mengirimkan berbagai bantuan militer, mulai dari persenjataan, teknologi perang yang canggih, sampai pengiriman lebih dari 10.000 ahli untuk memperkuat militer Mesir. Karenanya pula, militer Mesir tumbuh sebagai kekuatan yang ditakuti di Timur Tengah dan selalu benci dengan Israel. Namun setelah Anwar Sadat memerintah, permusuhan tersebut mulai melemah. Sadat mulai melakukan negosiasi rahasia dengan Israel. Menurutnya, perang hanya akan membuang waktu dan menyebabkan banyak kerugian bagi Mesir. Akibat perang, lebih dari 10.000 tentara Mesir terbunuh dan 101 pesawat mereka hilang. Bahkan Mesir kehilangan wilayah semenanjung Sinai sejak tahun 1967. Oleh karena itu, ia menilai bahwa jalur diplomasi merupakan cara yang paling murah, termasuk untuk mengembalikan keutuhan wilayah Mesir.

Keinginan Sadat disambut hangat oleh Israel karena Israel pun mulai kewalahan dengan perang. Meskipun menjadi pemenang dalam beberapa kali peperangan dengan bangsa Arab, Perdana Menteri Israel pada waktu itu, Menachem Begin menilai bahwa jalur diplomasi merupakan metode paling murah dan bisa meminimalisir korban dari rakyat dan tentara mereka. Apalagi Amerika meyakinkan bahwa jika Israel bisa berdamai dengan Mesir, maka perang dengan bangsa Arab secara keseluruhan bisa dihentikan. Hal ini dikarenakan posisi Mesir yang dianggap sangat strategis, terutama dalam hal kekuatan militer dan kepemimpinannya terhadap bangsa Arab. Bahkan peta politik Timur Tengah pun segera akan berubah dan menguntungkan Amerika dan Israel.

Melihat kesempatan tersebut, maka presiden Jimmy Charter segera mengambil kebijakan untuk memfasilitasi perjanjian damai kedua Negara di Camp David, sebuah kota yang terletak 70 miles dari gedung putih di daerah pegunungan Maryland. Oleh karena itu, perjanjian yang diadakan pada tanggal 17 September 1978 ini disebut sebagai perjanjian Camp David. Dalam perjanjian tersebut disepakati beberapa hal yang berkaitan dengan upaya damai kedua Negara. Beberapa di antaranya adalah bahwa Israel setuju untuk menarik pasukannya dari Semenanjung Sinai dan mengembalikan wilayah tersebut kepada Mesir. Namun sebagai harganya, Mesir harus menjadi negara Arab pertama yang mengakui keberadaan Israel sebagai negara bangsa¹³. Mereka juga sepakat untuk mengakhiri semua bentuk perang dan menyelesaikan semua masalah dengan cara diplomasi

C. ARAB SPRING

Arab Spring merupakan sebutan yang diberikan terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang berakhir dengan jatuhnya rezim berkuasa di negara-negara di kawasan tersebut. Proses demokratisasi ini dimulai dengan terjadinya transisi politik di Tunisia. Pada

¹³ <http://www.mythsandfacts.org/media/user/PLO-Agreement.pdf>

tanggal 19 Desember 2010 terjadi protes besar-besaran di kota miskin Sidi Bouzid, Tunisia, yang berujung pada penggulingan rezim otoriter Ben Ali. Peristiwa bersejarah tersebut pada akhirnya memicu pergerakan serupa di Mesir, Libya, Yaman dan Suriah. Para pengamat menyebut fenomena demokratisasi di kawasan Timur Tengah ini sebagai *Arab Spring*.¹⁴ Dalam peristiwa ini, masyarakat menuntut agar rezim otoriter yang berkuasa di berbagai negara Timur Tengah agar mundur dari jabatannya. Hal tersebut ditunjang oleh kondisi sosial yang buruk, seperti banyaknya pengangguran, tingginya angka korupsi, serta seringnya terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat negara kepada warganya.¹⁵

Transisi ini menciptakan instabilitas baik dari aspek politik maupun ekonomi. Jika kita menggunakan model kurva “J” Ian Bremmer, maka apa yang terjadi pada negara-negara di kawasan Timur Tengah ini masih berupa permulaan periode transisi. Menurut Bremmer setiap negara yang stabil karena “tertutup” harus melewati masa-masa transisi berbahaya sebelum mencapai kondisi stabil dan “terbuka”.¹⁶ Tunisia, Mesir, Yaman, Libya dan Suriah mengalami titik terendah kurva “J” di mana bahaya kekacauan terus mengancam. Hal serupa juga disampaikan oleh Jack Snyder yang berpendapat bahwa demokratisasi yang berlangsung cepat tanpa dipenuhinya prasyarat-prasyarat pendukung, justru akan menimbulkan kekacauan sosial.¹⁷ Fakta berkaitan dengan keadaan ini bisa terlihat dalam peristiwa kudeta militer di Mesir terhadap kepemimpinan hasil demokratisasi, atau pun perang sipil Suriah yang terus berlangsung sampai sekarang.

¹⁴ Marc Lynch, *Obama's 'Arab Spring'*, diakses melalui http://www.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_arab_spring.

¹⁵ Lieutenant Colonel El Hassane Aissa, *The Arab Spring: Causes, Consequences, and Implications*, diakses melalui <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA560779>.

¹⁶ Ian Bremmer, *The J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall* (New York: Simon & Schuster, 2006).

¹⁷ Jack Snyder, *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis* (Jakarta: KPG, 2000).

Dalam konteks Mesir, terlihat jelas bagaimana rejim militerisme kembali berkuasa setelah alam demokrasi yang mereka rasakan selama satu setengah tahun. Kudeta ini menyebabkan berbagai tragedi kemanusiaan yang kental dengan pengaruh kepentingan asing.¹⁸ Setelah terjadi arab spring, maka berbagai kepentingan dari Negara-negara major power berdatangan di kawasan timur tengah ini, termasuk dengan mesir. Para pemimpin Rusia datang ke Mesir untuk menjalin kerjasama militer yang intens. Tidak tanggung-tanggung, Rusia menawarkan kerjasama dengan nilai lebih dari 2 miliar dolar.¹⁹ Padahal sejarah menunjukkan bahwa kerjasama kedua negara ini sudah cukup lama terputus. Yang menarik adalah bahwa masuknya Rusia dalam politik Mesir ini tidak lama setelah Obama memutuskan untuk memotong bantuan dana kepada militer Mesir. Alasannya dikarenakan sikap militer Mesir yang dinilai tidak kooperatif dengan para pendukung Ikhwanul Muslimin. Militer dinilai telah melakukan beberapa tindak kekerasan. Oleh karena itu, militer Mesir kehilangan pendapatan rutin dari Amerika yang selama ini mereka dapatkan, yaitu sebesar \$ 1,3 miliar pertahun.²⁰

Maka kedatangan Rusia ke Mesir menjadi sinyal bahwa Rusia siap menggantikan posisi Amerika. Ia siap untuk membangun kembali kerjasama kedua negara yang pernah terjalin erat pada masa lalu. Seakan-akan Rusia mendukung Mesir meninggalkan sekutu eratnya Amerika yang selama tiga dekade telah bekerjasama dengan militer Mesir.²¹ Karena itu, kerjasama yang akan terus diintensifkan ini seakan merupakan reaktualisasi dari kerjasama masa lalu yang pernah jaya. Bahkan

¹⁸ <http://www.voanews.com/content/washington-military-aid-to-egypt-serves-us-national-security-interests/1899925.html>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2014.

¹⁹ <http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/terrorism-security/2013/1114/Egypt-s-message-to-the-US-We-ve-got-Russia>

²⁰ <http://thediplomat.com/2013/08/in-egypt-crisis-russia-sees-opportunity/>. Perhatikan bagaimana Amerika begitu pandai menarik simpati umat Islam dengan opini publik yang dibangunnya. Padahal banyak data yang menunjukkan bahwa Amerika menjadi aktor penting dalam kudeta militer terhadap pemerintahan Mursi.

²¹ <http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/terrorism-security/2013/1114/Egypt-s-message-to-the-US-We-ve-got-Russia>

pemerintah Rusia tidak hanya menawarkan berbagai fasilitas militer, tetapi juga siap untuk melakukan latihan militer bersama.²² Hal ini seolah menjadi antitesis dari hubungan kedua negara yang selama ini tidak baik, misalnya terlihat pada masa pemerintahan Husni Mubarak, dimana pernah 40.000 warga Rusia yang berwisata ke Mesir terjebak di kawasan Laut Merah seperti Hurghada dan Sharm El-Sheikh dan tidak mendapatkan kepastian keamanan.²³

Dalam politik, dikenal istilah *no free lunch* (tidak ada makan siang gratis). Dalam kasus kerjasama ini, maka Mesir menilai bahwa kerjasama dengan Rusia cukup strategis dan penting bagi masa depan politik domestik. Menteri Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa kerjasama dengan Rusia menjadi misi penting bagi Mesir mengingat Rusia merupakan salah satu kekuatan penting dalam politik Internasional dewasa ini. Selain itu, Mesir menilai bahwa dengan cara ini maka ia bisa menaikkan daya tawarnya kepada Amerika Serikat. Mesir ingin mereka kembali mendapatkan bantuan, bahkan dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Bagi Amerika yang memang merupakan musuh Rusia, melepaskan Mesir ke tangan Rusia mengandung resiko besar yang akan mengganggu kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Karena itu, sangat mungkin Amerika akan segera berfikir ulang untuk kembali memberikan bantuan kepada militer Mesir.

Dari peta ini kita bisa memahami bahwa kerjasama Mesir dengan Rusia tidak mempunyai jaminan akan tetap langgeng jika Amerika bisa menawarkan keuntungan bagi Mesir yang lebih besar daripada yang diberikan Rusia. Sejarah Mesir pun menunjukkan pragmatisme yang kental dimana kedekatan Mesir dengan Rusia menjadi dingin karena besarnya keuntungan yang dijanjikan Amerika sejak akhir tahun 1970-an. Yang dijadikan sahabat hanya negara yang bisa memberikan keuntungan optimal bagi kepentingan nasionalnya.

²² <http://thediplomat.com/2013/08/in-egypt-crisis-russia-sees-opportunity/>

²³ <https://www.aspeninstitute.it/aspensia-online/article/russia-and-egypt-old-relationship>



BAB 2

DEMOKRATISASI DAN KUDETA MESIR



A. MESIR MENJELANG DEMOKRATISASI

Sebelum terjadinya Arab spring, pemerintahan Husni Mubarak di Mesir tidak dinilai sebagai pemerintahan yang demokratis. Bahkan Husni mubarak sudah berkuasa di Mesir selama 30 tahun dari tahun 1981 sd 2011. Memang di Mesir tetap diadakan pemilu, tetapi dalam realitanya pemilu senantiasa dimenangkan oleh Husni Mubarak. Hal ini dikarenakan adanya indikasi bahwa telah terjadi kecurangan dalam pemilu di Mesir selama beberapa dekade.

Dengan pemerintahannya yang cukup lama tersebut maka seakan rejim Husni Mubarak sudah mengetahui segala seluk beluk dari politik Mesir dan apa yang harus mereka lakukan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Apalagi selama ini mereka mendapatkan dukungan yang kuat dari Amerika dan Israel yang sudah menjadi sekutu rejim ini sejak awal. Amerika dan Israel merasa diuntungkan dengan telah ditandatanganinya perjanjian Camp David pada tahun 1978 oleh Anwar Saddat, pemerintahan sebelum Husni Mubarak berkuasa.

Dengan kekuasaan yang dimilikinya selama 30 tahun dari 1981 sd 2011, maka sikap dari rejim Mubarak pun

cenderung otoriter. Keadaan ini seakan membenarkan pameo dalam politik bahwa *power tend to corrupt*. Mereka yang sudah mendapatkan kekuasaan senantiasa berusaha untuk mengamankan posisinya dan menginginkan agar tidak ada satu pun dari kelompok lain yang mengganggu keamanan mereka.

Berbagai kebijakan pun mereka keluarkan yang mana tidak semuanya betul-betul demokratis dan sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat Mesir. Namun posisi mereka tetap aman, apalagi Mubarak didukung penuh oleh kelompok militer. Di berbagai negara berkembang utamanya, jika militer sudah mendukung suatu rejim maka kekuasaannya cenderung akan bertahan lama. Hal ini dikarenakan militerisme membungkam budaya demokrasi yang seharusnya dikembangkan di tengah masyarakat.

Kelompok islam tidak ketinggalan menjadi korban bagi kebijakan yang diambil oleh Mursi. Gerakan yang sangat merasakan persoalan adalah Ikhwanul Muslimin yang merupakan gerakan Islam yang sebenarnya sudah lahir di Mesir sebelum kelahiran negara yang terkenal dengan sungai nil ini.

Di antara hal yang dilakukan oleh Mubarak pada masa kekuasaannya adalah dengan pelarangan terhadap gerakan IM. Bagi Mubarak, IM merupakan ancaman dalam rezim yang ia bangun. IM dinilai sebagai gerakan garis keras yang sering berbeda pendapat dengan pemerintah. Hal inilah yang membuat gerakan ini menjadi terlarang selama pemerintahan Mubarak. Bahkan lebih dari itu, berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM dilakukannya.

Kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat utamanya yang banyak dilakukan oleh kelompok IM untuk mengkritik pemerintahannya pun dihilangkan. Ini terlihat dalam kebijakan pemerintah Mubarak yang melarang terjadinya penghinaan terhadap presiden.

Selain itu, pemerintahan Mubarak sangat terkenal dengan kebijakan liberalisasi ekonomi. Upaya melakukan liberalisasi ekonomi ini secara intensif dilakukan oleh Mubarak

sejak 1991. Pada waktu itu berbagai belahan dunia yang lain seperti India juga melakukan hal yang sama. Mereka sudah merasa bahwa memberatkan diri pada pemahaman sosialis justru akan menjadi beban bagi negara dan mempersulit proses pembangunan. Karenanya Mubarak mulai banyak membuka kran-kran untuk sektor swasta dan membatasi kran publik. Dana pinjaman asing seperti IMF pun mulai diintensifkan untuk melakukan proses pembangunan.

Dampaknya, secara makro ekonomi pertumbuhan ekonomi Mesir memang meningkat. Jika pada tahun 1981 hanya berkisar US\$ 1.355, GDP Mesir berubah menjadi US\$ 4535 pada tahun 2008 dan US\$ 6.180 pada tahun 2010²⁴. Namun demikian, kajian ekonomi politik tentu tidak bisa hanya dilihat dalam artian makro semata, melainkan juga pada level mikro. Justru peningkatan jumlah masyarakat miskin juga sangat signifikan. Gap antara yang kaya dan yang miskin semakin mengangah.

Bahkan tidak sedikit akhirnya di antara masyarakat Mesir yang harus menunda pernikahan mereka karena kesulitan tersebut. Biaya hidup menjadi semakin mahal, apalagi yang berkaitan dengan masalah properti. Akibatnya, banyak mereka yang sudah menikah harus tetap tinggal bersama orang tuanya. Tidak sedikit satu rumah yang diisi bahkan lebih dari 6 atau 7 keluarga sekaligus.

Untuk keperluan ini maka Mubarak merupakan seorang pemimpin yang berusaha untuk dekat dengan semua kalangan di luar negeri seperti Amerika, Rusia, India dan berbagai negara barat lainnya. Namun dalam upaya menjaga image regional, Mesir pun tetap tergabung dalam arab league. Kedekatan dengan beberapa negara ini pula yang membuat Mubarak juga banyak mengeluarkan kebijakan yang justru menguntungkan Israel, termasuk di antaranya adalah pembuatan tembok pembatas semenanjung sinai dan Gaza.

²⁴ <http://www.tradingeconomics.com/egypt/gdp-per-capita-ppp> Egypt
GDP per capita PPP

Dengan terbatasnya akses dari masyarakat Gaza untuk berinteraksi dengan masyarakat Mesir yang ada di semenanjung Sinai karena terpisahkan oleh tembok tersebut, posisi bangsa Palestina pun menjadi semakin lemah. Berbagai persoalan yang dihadapi lebih banyak mereka tangani sendiri karena kesulitan akses bagi pihak luar untuk datang memberikan bantuan.

B. ARAB SPRING DAN PERUBAHAN STRUKTUR POLITIK MESIR

Arab spring merupakan titik perubahan penting bagi politik yang berkembang di kawasan Timur Tengah. Gelombang ini dimulai pada tahun 2010 di Tunisia ketika masyarakat menuntut pemerintah untuk turun dari kekuasaannya. Efek domino yang terjadi ternyata luar biasa, dimana kejadian di Tunisia juga menjadi inspirasi bagi negara-negara Arab yang lain untuk merubah struktur politik yang ada di negara mereka masing-masing. Polanya seakan bergerak dari barat ke Timur, dimana Libya pun sebagai negara tetangga Tunisia langsung terpengaruh.

Setelah arab spring berhasil mempengaruhi politik di beberapa negara tetangga, seperti turunnya Khadafi dari puncak kepemimpinan Libya, maka masyarakat Mesir pun mulai terinspirasi. Mereka pun menuntut hal yang sama untuk membuat sesuatu yang selama ini terkesan tidak mungkin menjadi kenyataan, yaitu pergantian kekuasaan dari pemerintahan Mesir.

Karena itu, ribuan masyarakat Mesir pun turun ke jalan, menguasai plaza, melakukan penolakan dan ketidaktaatan sipil menentang pemerintahan Mubarak yang sedang berkuasa. Jutaan orang yang berasal dari berbagai kalangan tadi baik kelompok Islamis, liberal, anti kapitalis, nasionalis dan feminis turun ke jalan dan menyebabkan terjadi kericuhan. Paling tidak lebih dari 846 orang terbunuh dan 6000²⁵. Para pengunjung rasa pun terpancing emosinya dan membakar paling sedikitnya 90

²⁵ <http://www.almasryalyoum.com/news/details/123283>

stasiun polisi. Mereka pun tersebar di berbagai kota seperti Cairo, Alexandria, dll.

Yang mereka tuntut adalah agar pemerintah memberikan kebebasan bersuara pada masyarakat, adanya perbaikan ekonomi, penurunan angka korupsi, sikap polisi dan militer yang bersahabat, dan berbagai perbaikan dalam bidang sosial dan politik. Suatu keadaan dimana masyarakat meledakkan kemarahan yang selama ini mereka simpan selama beberapa tahun kepada pemerintahan Mubarak. Mereka merasakan bahwa ini adalah momentum yang paling tepat untuk menumbangkan kekuasaan Mubarak dan menggantikannya dengan rejim demokratis. Apalagi beberapa negara tetangga yang mengalami Arab spring juga sudah bisa menunjukkan buktinya.

Gerakan penentangan terhadap Mubarak pun semakin meluas dan kondisi stabilitas keamanan dan politik pun semakin tidak menentu. Akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011, wakil presiden Omar Sulaiman mengumumkan bahwa Mubarak siap untuk mundur sebagai presiden, dan menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan militer²⁶. Masyarakat pun menyambutnya dengan antusias, tetapi selama enam bulan kemudian militer bertugas untuk mempersiapkan proses demokratisasi di Mesir.

C. DEMOKRATISASI MESIR

Setelah runtuhnya kekuasaan Husni Mubarak di Mesir, maka mulai dilakukan upaya untuk melakukan demokratisasi yang lebih terstruktur di negeri ini. Sebelumnya memang ada pemilu, tetapi senantiasa dimenangkan oleh Mubarak yang didukung oleh kelompok militer. Maka setelah pemerintahan tumbang, hal pertama yang dilakukan adalah dengan membentuk *interim government* yang bertugas untuk

²⁶<http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/201121125158705862.html>

melaksanakan pemilu sampai terpilihnya pemerintahan berikutnya.

Yang bertugas melaksanakan program berat ini adalah militer dengan lembaganya Supreme Council of the Armed Forces. Dalam banyak kesempatan mereka menyatakan bahwa mereka tidak punya keinginan untuk menduduki kekuasaan melainkan hanya sekedar memfasilitasi agar munculnya pemerintahan yang demokratis.

Menghadapi persiapan transisi demokrasi inilah kelompok yang selama ini menentang Mubarak mulai berbeda pendapat. Kelompok liberal, sekuler dan kiri berpandangan bahwa diperlukan waktu yang lebih lama untuk menghadapi masa transisi di Mesir. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang didapatkan lebih optimal dan juga memberikan kesempatan kepada segenap kalangan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik Mesir, termasuk di dalamnya adalah untuk mendirikan parta politik.

Namun pada sisi lain, kelompok Islamis memiliki pandangan yang berbeda. Menurut kelompok yang diwakili oleh IM, salafi dan perwakilan dari rejim yang lama, transisi demokrasi membutuhkan biaya yang mahal baik secara ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu, upaya akselerasi untuk terbentuknya pemerintah baru harus segera dilakukan²⁷.

Jika mau dianalisa lebih lanjut sebenarnya alasan dari kedua kelompok ini sama-sama kuat, terutama dalam hal kepentingan pragmatis. Pada satu sisi kelompok yang ingin menunda dan perpanjangan waktu transisi sebenarnya bukan mereka yang sudah mempunyai basis masa yang kuat. Karenanya mereka membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melakukan konsolidasi.

Berbeda halnya dengan kelompok islamis yang selama ini memang banyak bergerak dari satu masjid ke masjid yang

²⁷http://www.oiiip.ac.at/fileadmin/Unterlagen/Dateien/Publikationen/Egypt_in_Transition_current_analysis.pdf

lainnya. Berdasarkan hitungan di atas kertas, maka jika diadakan pemilu lebih cepat tentu mereka yang akan menjadi pemenangnya. Hal inilah yang tidak ingin mereka lewatkan, karena jiwa waktu diperpanjang untuk proses transisi, sangat mungkin terjadi pergeseran suara sehingga mereka pun tidak bisa memenangkan pemilu.

D. BANGKITNYA KEKUATAN IKHWANUL MUSLIMIN

Akhirnya, setelah diadakan pemilu pertama di Mesir pasca Mubarak, kelompok Islam pun memenangkan suara, bahkan suara yang berhasil mereka dulang sebesar 51,7 %. Hal yang juga lebih mengejutkan adalah kelompok Islam juga diperkuat oleh kelompok salafi yang selama ini dikenal sebagai gerakan yang anti demokrasi. Namun dalam kasus Mesir, mereka pun akhirnya malah mendirikan partai yang dikenal dengan partai Annur. Dengan kondisi ini, maka kekuatan IM pun semakin kuat untuk menunjukkan identitas keislaman mereka di Mesir.

Gerakan IM di Mesir sebenarnya sudah muncul sejak lama di Mesir, bahkan sebelum adanya Mesir itu sendiri. Pada awalnya, Hasan Al Banna sebagai pendiri IM pada tahun 1928 lebih banyak menangani masalah keagamaan, sosial budaya dan pendidikan. Mereka merupakan suatu gerakan yang berusaha untuk mengembalikan nilai-nilai Islam di tengah gelombang sekularisasi yang melanda dunia Islam pada waktu itu. Utamanya setelah terjadi gelombang sekularisasi di Turki.

Namun dalam perkembangannya, gerakan ini akhirnya berubah menjadi gerakan politik. Hal ini banyak terpengaruh dengan sikap pemerintah Mesir yang pada waktu itu banyak melakukan penekanan terhadap gerakan IM. IM dinilai telah menjelma seperti negara di dalam negara, karena organisasi ini seperti sudah mempunyai struktur sebagaimana halnya negara. IM mempunyai pimpinan, mempunyai pengikut yang jumlahnya cukup besar.

Karena khawatir jika posisi IM akan menyaingi posisi negara, maka pada waktu itu pimpinan IM Hasan AL Banna dibunuh. Kondisi inilah yang kemudian mendorong bagi IM untuk mulai terlibat dalam isu politik. Apalagi pada saat itu, Sayyid Qutb yang sebelumnya bukanlah anggota IM mulai bergabung dalam gerakan ini. Ia pun mulai banyak menulis tentang sikap yang perlu diambil dalam merespon sikap yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada saat itu, ia pun memperkenalkan konsep *near enemy*. Dalam hal ini, ia mencoba merubah paradigma dari pengikut IM yang selama ini lebih banyak menilai bahwa musuh dari umat Islam adalah musuh dari luar. Namun dalam pandangan Sayyid Qutb, mereka yang sebenarnya secara identitas menyebut diri sebagai muslim, hanya saja dalam realitanya menentang gerakan islam, maka mereka pun bisa dikategorikan sebagai musuh yang boleh diperangi.

Karena gerakan ini akhirnya sudah mulai berubah ke arah politik, maka pada akhir tahun 1940, IM pun sudah mulai melakukan upaya untuk menerapkan syariat Islam. Ini pula yang kemudian menjadi alasan pemerintah Mesir mulai melakukan pelarangan terhadap IM. Pada tahun 1954, maka 4000 dari anggota IM ditangkap, dan tidak sedikit dari mereka yang dijebloskan ke penjara. Bahkan sebagian lagi juga melarikan diri keluar dari Mesir, seperti Aljazair, Baghdad, dll²⁸.

Kondisi tersebut terus berlangsung termasuk selama masa pemerintahan Mubarak. Akhirnya gerakan ini nyaris tenggelam dan berbagai upaya yang mereka ingin lakukan dibatasi oleh negara. Ketika mereka ingin membantu Hamas di Palestina mereka pun terhalang. Begitu juga dengan upaya untuk menjelma menjadi partai politik. Alasan sederhana yang dimunculkan adalah bahwa pengaruh qutbisme sudah sedemikian kuat dalam gerakan ini. Qutbisme secara

²⁸ Charles Onians. Supply and Demand Democracy in Egypt. *World Policy Journal*, Vol. 21, No. 2 (Summer, 2004)Page 78

internasional dikenal sebagai ideologi yang mendasari lahirnya terorisme.

Namun pandangan tersebut akhirnya terbantahkan dengan perkembangan yang terjadi di Mesir pasca Mubarak. Buktinya ketika diadakan pemilu, IM mendapatkan dukungan yang sangat tinggi. Dalam pemilu yang diadakan sampai dua kali dari tanggal 23 dan 24 Mei 2012, kemudian dilanjutkan lagi dengan pemilu tanggal 16 sd 17 Juni 2012. Dalam ronde pertama, masing-masing calon presiden mendapatkan suara yang tidak terlalu jauh berbeda antara satu dengan lainnya. Mohamed Morsi meraih 25% suara, Ahmed Shafik mendapat 24%, Hamdeen Sabahi (21%), Abdel Moneim Aboul Fotouh (17%) dan Amr Moussa (11%).

Akhirnya ketika diadakan ronde kedua, pada tanggal 24 Juni 2012 diumumkan bahwa Mursi sebagai wakil dan Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu dengan suara mencapai hampir 52 %. Artinya secara demokratis Mursi terpilih menjadi presiden Mesir, mengalahkan Ahmed Shafik yang meraih suara 48 % suara. Akhirnya pada tanggal 30 Juni ia disumpah sebagai presiden Mesir. Suatu bukti bahwa IM di Mesir pasca Mubarak menjadi semakin kuat, setelah selama berpuluh tahun menjadi partai terlarang di negeri ini.

Selama ini ikhwanul muslimin terkenal sebagai gerakan yang sering menyatakan bahwa Islam adalah solusi bagi setiap persoalan yang dihadapi. Pada kesempatan yang lain, mereka juga banyak membawa slogan Jihad adalah jalan kami dan bom bunuh diri adalah jalan untuk mencapai tujuan tertinggi²⁹. Namun dengan kemenangan dalam pemilu 2012, paling tidak bisa menjadi bukti bahwa kekuatan mereka cukup diperhitungkan dan mendapatkan dukungan besar dari berbagai kalangan masyarakat.

²⁹ Ferry de Kerckhove. 2012. *Egypt's Muslim Brotherhood and the Arab Spring*. Canada: CDFAI. Hal 1.

E. MURSI SEBAGAI AKTOR PENTING IM MESIR

Membahas kebangkian IM dengan kemenangannya dalam pemilu 2012 di Mesir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sosok Mursi. Mursi merupakan ketua Partai Pembebasan dan Keadaan Mesir, sebuah partai yang didirikan oleh kelompok IM pasca terjadinya revolusi Mesir. Selain itu, Mursi juga sempat menduduki beberapa posisi strategis lainnya, seperti anggota parlemen Mesir pada tahun 2000 sd 2005.

Berbagai posisi strategis yang didapatkannya tersebut, bahkan membuatnya menjadi presiden terpilih pertama pasca tumbanganya Mubarak tidak terlepas dari latar belakang pendidikan dan kehidupannya yang mengagumkan banyak orang. Mursi setelah mendapatkan gelar sarjana dan master di University Cairo Mesir kemudian melanjutkan pendidikan PhD di University of Southern California Amerika sampai tahun 1982. Karenanya terlihat sekali bagaimana latar belakang yang ideal dimana ia mampu menggabungkan spritualitas yang terbangun dengan kehidupannya masa kecil dan keterbukaan berpikir masyarakat Amerika. Maklum Mursi sendiri berasal dari Sharqiya, wilayah bagian utara Mesir sekitar sungai nil dan dilahirkan pada tahun 1951.

Adapun keterlibatannya dalam IM juga mempunyai sejarah yang panjang. Ia bergabung dalam IM pada tahun 1977 dalam usia masih belia. Selama ini pula secara aktif ia melakukan proses pembelajaran dan menjaga idealismenya untuk menjadi seorang yang kritis. Hal inilah yang akhirnya membuat Mursi sempat beberapa kali dijebloskan ke dalam penjara pada masa pemerintahan Husni Mubarak.

Jatuhnya kekuasaan Mubarak menjadi kesempatan baginya untuk menunjukkan ketokohnya dalam gerakan Islam, utamanya IM. Hal inilah yang membuat Mursi juga disebut sebagai presiden islamis pertama di dunia arab. Meskipun demikian, dalam upaya untuk menjaga netralitas sebagai bapak negara, setelah diumumkan sebagai presiden kelima Mesir, ia pun segera mengundurkan diri dari keanggotaan IM. Berbagai predikat baru pun ia dapatkan,

termasuk di antaranya adalah sebagai pemimpin Mesir pertama yang berasal dari luar kalangan militer, atau presiden Mesir pertama yang dipilih secara demokrasi.

F. KEBIJAKAN STRATEGIS MURSI

Setelah menjadi presiden Mesir, Mursi pun mulai melakukan beberapa langkah dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang melanda Mesir. Ia memimpin dalam keadaan Mesir menghadapi persoalan sosial, politik, budaya dan ekonomi yang cukup serius. Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya yang sebenarnya cukup singkat karena akhirnya di kudeta oleh militer, Mursi sempat mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya sebagai berikut:

G. KEBIJAKAN LUAR NEGERI MURSI

Ketika terpilih menjadi presiden Mesir, menggantikan Husni Mubarak, maka Mursi melakukan paling tidak dua hal penting dalam politik luar negeri Mesir. Hal tersebut meliputi upaya Mursi untuk memperkuat peran Mesir dalam politik regional dan upaya untuk mencari partner baru dalam hubungan Internasional³⁰.

Dalam hal penguatan peran regional, maka hal pertama yang dilakukan oleh Mursi terlihat dari kesungguhannya untuk membangun konsolidasi kawasan. Hal ini sangat terlihat dari kunjungan awal yang ia lakukan dimana ia tidak terlebih dahulu mengunjungi Amerika atau pun Eropa. Namun justru pertama ia berkunjung ke Ethiopia, Saudi Arabia, China dan Iran. Dalam beberapa pertemuan lain ia juga menghadiri African Union Summit untuk menunjukkan bagaimana pentingnya kawasan Afrika bagi Mesir. Untuk kawasan arab, Mursi juga sudah mulai mengembangkan “islamic peace initiative” sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi antara Iran, Saudi,

³⁰http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C35_gmm_rll.pdf

Turki dan Mesir. Mursi pun pada masa pemerintahannya yang singkat akhirnya menghadiri pertemuan gerakan non blok yang pada waktu itu diadakan di Taهران.

Meskipun berasal dari gerakan Islam, tetapi Mursi bukan seorang yang menjadikan ideologi fundamentalnya sebagai orientasi. Banyak nilai-nilai Islam yang ia bawa dalam politik luar negerinya, tetapi tidak dengan orientasi keislaman. Ia mencoba untuk menggabungkan nilai-nilai tadi dengan konteks kekinian yang berkembang dalam politik modern. Dalam hal ini, ia banyak dibantu oleh Reefa El Tahtawi sebagai kepala kantor kepresidenan. Hanya saja karena pemerintahan tidak cukup lama, akhirnya sebagian pengamat menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Mursi selama ini masih baru sekedar simbol. Misalnya dalam hal hubungan dengan Hamas, pemerintahan Mursi terlihat memberikan dukungan, tetapi hubungan tersebut akhirnya tidak sampai pada pembukaan daerah perbatasan antara Gaza dengan Sinai. Termasuk dalam hal rencana perdagangan bebas antara Mesir dengan Gaza, Mursi menolak usulan ini. Artinya, belum cukup banyak perubahan yang berarti dalam politik luar negeri Mesir dibandingkan dengan kebijakan yang diambil oleh Mubarak.

Adapun di antara contoh upaya Mesir mencari partner baru dalam hubungan internasional, terlihat dari pendekatan yang dilakukan oleh Mursi terhadap Iran. Suatu pola hubungan yang awalnya dinilai akan mampu memperkuat eksistensi Mursi sebagai tokoh Islam. Namun ia lupa bahwa hal ini pula yang sebenarnya punya peran besar untuk meruntuhkan kekuasaannya di Mesir.

Pada akhir Maret 2013, berbagai media massa memberitakan pembukaan penerbangan perdana dari Mesir ke Iran dan sebaliknya. Hal ini menggambarkan cairnya hubungan kedua negara setelah terputus lebih dari tiga dekade. Hubungan kedua negara mulai hangat sejak Husni Mubarak tumbang dari kekuasaannya, lebih – lebih ketika Mursi terpilih sebagai presiden Mesir pertengahan tahun lalu.

H. MESIR - IRAN JADI AKRAB

Jika sebelumnya hubungan Mesir dan Iran tidak begitu baik, pada bulan Februari 2011, setelah jatuhnya kekuasaan Husni Mubarak, Iran langsung menjajaki peluang mendekati Mesir. Hal ini dilakukan dengan permohonan izin transit dua kapal perang Iran untuk melewati terusan Suez, hal yang selama ini tidak pernah dilakukan Iran.

Upaya Iran pun mendapat sambutan manis dari Mursi. Tidak lama setelah terpilih menjadi presiden Mesir, pada Agustus 2012, Mursi melakukan kunjungan ke Iran guna menghadiri pertemuan non Blok. Dalam pertemuan ini, Ahmadenejad mengatakan bahwa Mesir dan Iran mempunyai hubungan budaya yang sangat dekat, sehingga Iran ingin selalu bergandengan tangan dengan Mesir untuk masa-masa yang akan datang.

Mursi pun menyambut hal itu dengan menyatakan bahwa kebuntuan konflik antara sunni dan syiah yang selama ini berlangsung harus dipecahkan. Karenanya, pada bulan Februari 2013, ia mengundang Ahmadenejad untuk melakukan kunjungan balasan ke Mesir sekaligus menghadiri pertemuan OKI.

Berbagai pembicaraan untuk mengakrabkan hubungan kedua negara pun berkembang. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi terutama dalam bidang pariwisata. Karenanya pada bulan Februari 2013, Menteri Pariwisata Mesir melakukan kunjungan ke Taheran untuk menandatangani MoU dalam bidang pariwisata antara kedua negara. Pada bulan Maret 2013, penerbangan perdana Mesir - Iran pun dibuka.

Dengan cara ini Mursi ingin membangun *image* bahwa pemerintahannya berbeda dengan Mesir pada masa Husni Mubarak yang merupakan antek Amerika. Karena dikenal sebagai negara yang vokal terhadap Amerika, Mursi mendekatkan diri dengan Iran tanpa memahami dengan seksama konspirasi yang dibangun Iran.

Selain itu, Mursi menilai bahwa kerjasama ini akan memberi banyak manfaat terhadap ekonomi Mesir. Menurutnya, melalui kerjasama ini Mesir akan mendapatkan miliaran dolar Amerika dari investasi Iran, yang artinya juga membuka ribuan lapangan pekerjaan. Belum lagi peningkatan wisatawan Iran ke Mesir yang diperkirakan dalam enam bulan saja sudah akan mencapai jumlah satu juta orang.

Apalagi jika dilihat dari latar belakang Mursi sebagai kader Ikhwanul Muslimin, pilihan politik yang beliau lakukan dengan memperat hubungan kerjasama dengan Iran cukup beralasan. Adib-Moghaddam menjelaskan bahwa IM merupakan organisasi politis yang telah mengadopsi konsep demokrasi yang menerima kedaulatan masyarakat dalam tata politik negara sehingga sering terkesan pragmatis.

I. MAU UNTUNG JADI BUNTUNG

Untuk pemahaman di atas kertas, argumen Mursi dalam membangun kerjasama dengan Iran bisa dipahami. Namun, jika melihat realitas di lapangan, maka pilihan politik Mursi menyebabkan dua masalah besar bagi bangsa Mesir. Pertama, terkait permasalahan politik yang ditunjukkan dengan perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama berkaitan dengan kelompok sunni yang menentang syiah.

Di dalam negeri, demonstrasi menentang kebijakan Mursi terus berlangsung. Beberapa waktu lalu, sekelompok demonstran mendatangi Kedutaan Iran di Mesir dan mengganti bendera Iran dengan bendera kelompok oposisi di Suriah. Menurut mereka, kebijakan Mursi membangun kerjasama dengan Iran ditolak baik karena alasan politik maupun agama.

Dalam hal ini, Iran merupakan negara yang membantu kelompok Bassar Al Assad dan Hizbullah membunuh kaum sunni di Suriah. Hal ini terus berlangsung sampai sekarang dimana Iran mendukung pemerintah Suriah memerangi mayoritas masyarakat yang merupakan kelompok sunni.

Menurut data PBB, konflik ini telah menyebabkan lebih dari 70.000 penduduk terbunuh.

Iran juga membantu Al Maliki membantai kaum sunni di Irak. Karenanya kerjasama dengan Iran sama sekali tidak bisa dibenarkan. Belum lagi kasus-kasus di negara lain seperti Bahrain dan Yaman dimana Iran senantiasa memberikan dukungan terhadap kelompok yang ingin membuat kekacauan di negara-negara sunni.

Lebih dari itu, di kalangan masyarakat Mesir muncul ketakutan akan kembalinya kekuasaan Syiah di Mesir sebagaimana terjadi pada masa dinasti Fatimiah dimana mereka melakukan revolusi untuk merebut kekuasaan Mesir. Bahkan ketika memerintah, berbagai tindak kekejaman dialami oleh masyarakat Sunni Mesir. Luka lama ini membuat banyak masyarakat Mesir menentang kebijakan Mursi yang berusaha membangun hubungan akrab dengan Iran.

Syaikh Sharif Al Hawari bahwa menjelaskan berbagai kepentingan syiah di Mesir yang ingin merubah Mesir dari negara sunni menjadi negara syiah. Bahkan untuk meraih kepentingannya mereka tidak segan-segan bekerjasama dengan pihak asing. Apalagi sejarah pernah membuktikan keperpihakan syiah terhadap tentara Mongol yang menginvasi Irak dan Suriah pada abad ke 7 dan 13. Bagi orang syiah, posisi Al-Azhar yang mereka klaim sebagai universitas yang didirikan oleh Bani Fatimiah harus dikembalikan kepada asal muasalnya sebagai universitas syiah³¹.

Bahkan penentangan terhadap kebijakan Mursi juga terjadi dari negara-negara teluk yang notabene mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan rakyat Mesir. Lebih dari satu juta masyarakat Mesir bekerja di negara-negara teluk, bahkan putra Mursi sendiri yang merupakan seorang fisikawan

³¹ Christopher Anzalone. Egyptian Salafis Protest Warming Relations with Iran amidst Rising Regional Sectarian Tensions. 9th April, 2013. <http://tahrirsquared.com/node/4057>

di Saudi Arabia. Konsekuensinya, Mursi harus siap-siap dengan pilihan politik yang ia ambil.

Kedua, terkait dengan kepentingan strategis negara dimana kerjasama Mesir dengan Iran sesungguhnya tidak cukup menguntungkan secara ekonomi dan keamanan negara. Bahkan hal ini sudah mulai terlihat sejak kunjungan Ahmadinejad pada tanggal 5 Februari 2013. Pada waktu itu mata uang Mesir langsung jatuh 9 % dari bulan sebelumnya, menjadi \$13 miliar, jauh lebih rendah dari kondisi pada masa Husni Mubarak yang berada pada posisi \$ 32 miliar.³². Artinya, argumen Mursi yang menilai bahwa kerjasama dengan Iran akan meningkatkan ekonomi negara tidak strategis³³.

Kebijakan Mursi bahkan menjadi bumerang bagi Mesir karena berbagai trik yang bisa dilakukan oleh kelompok syiah Iran. Mereka bisa menyebarkan berbagai macam penyakit yang disebabkan bolehnya pernikahan mut'ah di kalangan syiah. Atau juga bisa menyusupkan kekuatan mereka untuk menyebarkan berbagai paham syi'ah ke tengah masyarakat Mesir.

Iran merasa punya kepentingan besar terhadap Mesir mengingat Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan Islam yang merupakan tempat puluhan ribu mahasiswa dari berbagai negara belajar. Artinya, jika syiah bisa menguatkan posisinya di Mesir maka dengan mudah mereka akan bisa menanamkan berbagai pengaruhnya kepada para mahasiswa tadi sehingga pemahaman mereka tersebar ke berbagai negara. Apalagi jika strategi sebagaimana yang mereka lakukan di India dengan memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang kurang mampu dilakukan, dengan catatan mereka mau menjadi seorang syiah.

Karenanya, pernyataan yang disampaikan oleh Syaikh al-Zughbi menjadi relevan. Ia menyampaikan nasehat kepada presiden Mesir agar bertaubat kepada Allah dengan

³² Hillel Frisch. Morsi's Egypt and Ahmadinejad's Iran: Much Ado Over Next to Nothing. BESA Center Perspectives Paper No. 196, February 10, 2013

³³ <http://www.gensyiah.com/syaikh-al-zughbi-meledakkan-bom-di-hadapan-duta-iran-di-mesir.html>

memutuskan hubungan Mesir terhadap Iran. Pilihan membangun kerjasama dengan Iran hanya akan mengeluarkan biaya sosial dan keamanan negara yang sangat besar, bahkan membunuh Mesir.

J. PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK

Pada saat menjadi presiden, maka Mursi juga mempunyai tugas yang berat untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi, baik dari pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran, mempunyai jumlah yang cukup tinggi. Dalam hal ekspor dan impor, Mursi mewarisi keadaan ekonomi yang tidak seimbang pada masa Mubarak.

Gambaran ekonomi pada waktu akhir periode Mubarak sangat mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi Mesir hanya berkisar 2 sd 5 % saja. Adapun upaya untuk membangun kepercayaan asing agar bisa berinvestasi di Mesir nyaris ambruk karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Apalagi persoalan keamanan juga tidak mendapatkan jaminan yang cukup meyakinkan.³⁴

Demikian juga dengan tingkat pengangguran di Mesir yang semakin meningkat, bahkan angkanya mulai mencapai 12 persen secara keseluruhan. Sebagian besar dari mereka yang kehilangan pekerjaan tersebut adalah kalangan dengan usia produktif yang berusia 15 sd 24 tahun. Inflasi di negara ini pun bahkan sudah mencapai angka 10 %. Akhirnya nilai uang yang dimiliki oleh Mesir pun menurun drastis dan seperti tidak berharga. Kondisi ini tentu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya termasuk dalam hal pariwisata dan investasi asing. Kondisi ini pada akhirnya membuat kondisi ekonomi

³⁴ US Energy Information Administration (EIA), Egypt Overview, updated 31 July 2013, <http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=EG>; Laura Raus and John Pastrokos, "The Impact of Gulf Aid on Egypt's Economy", in Egypt Oil and Gas, No. 82 (October 2013), p. 14-15, http://www.egyptoil-gas.com/read_article_issues.php?AID=686

Mesir menjadi semakin mengkhawatirkan dan angka pengangguran di tengah masyarakat pun semakin meningkat³⁵.

Padahal jika dilihat dalam artian Marxist kondisi ini tentu akan sangat membahayakan. Premis yang muncul adalah bahwa ekonomi merupakan suprastruktur di tengah masyarakat yang banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya. Ketika ekonomi di sebuah negara tidak stabil, maka berbagai aspek kehidupan lainnya seperti sosial, politik dan budaya juga akan terpengaruh.

Meskipun kondisi ekonomi yang buruk ini merupakan warisan dari rejim sebelumnya, tetapi tetap Mursi punya tanggungjawab sebagai presiden. Masyarakat banyak yang berharap instan bahwa pemimpin mereka akan segera menyelesaikan berbagai persoalan ini. Jika Mursi gagal dalam memperbaiki ekonomi Mesir, maka ia pun yang akan menjadi korban dan dinilai memperburuk kondisi ekonomi. Posisi yang cukup sulit bagi seorang pemimpin yang juga sedang menghadapi persoalan legitimasi dan keamanan politik dari rongrongan kelompok yang tidak menyukainya.

Dengan adanya tugas berat lain dalam upaya menjaga unifikasi masyarakat dalam politik, dan tenggang waktu memerintah yang belum cukup lama, banyak pihak yang menilai bahwa Mursi telah gagal dalam memperbaiki ekonomi Mesir. Kebijakannya dalam ekonomi dinilai sama dengan pendahulunya, Husni Mubarak. Perbandingan tersebut dalam terlihat dalam tabel 1.

Namun dalam realitanya apa yang dilakukan oleh Mursi dinilai tidak cukup memperbaiki kondisi ekonomi Mesir yang selama ini memang lemah. Pada waktu berkuasa, Mursi sempat berupaya untuk meminta bantuan dari IMF, tetapi nyatanya sampai kekuasaan Mursi dikudeta oleh militer, keinginan tersebut tidak pernah bisa terwujud. Padahal saat itu Mesir sangat membutuhkan dana untuk memperbaiki ekonominya

³⁵http://www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/articles/Heineman-Atlantic-12-18-12.pdf

yang porak poranda³⁶. Kondisi yang hampir sama dengan keadaan ekonomi Mesir pada masa Anwar Saddat. Saat itu, Mesir menghadapi masalah serius karena penutupan terusan Suez dan penguasaan semenanjung Sinai oleh Israel pasca Mesir kalah dalam perang enam hari melawan Israel. Dengan kondisi keamanan yang tidak terjamin tersebut, dalam hal pariwisata Mesir pun menghadapi persoalan serius³⁷.

Tabel 1

Morsi's budget does not look different from his predecessor's

	2012/2013 budget		2013/2014 budget
	Plan	Turnout	plan
Wages and salaries	137	143	172
Subsidies, grants and social benefits	146	183	206
Interest payments	134	139	182
Other expenditure	118	123	133
Total expenditure	534	587	692
Overall deficit (% of domestic output)	7.6	10.7	9.5

Note: All figures are in billions of Egyptian pounds unless otherwise mentioned.
Sources : Ministry of Finance, Al Bayan, Awraq.

K. KEBIJAKAN KONTROVERSIAL MURSI

Selain berbagai persoalan sebagaimana diuraikan di atas, hal yang juga sangat besar pengaruhnya dalam upaya kelompok militer untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Mursi di Mesir disebabkan oleh karena beberapa kebijakan kontroversial yang dikeluarkannya. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya:

a. Pelemahan Militer - Pensiunkan Para Jenderal

Hal lain yang juga kurang diperhitungkan oleh sisi dalam mengambil kebijakannya adalah ketika ia pensiunkan beberapa jenderal yang selama ini dinilai loyal

³⁶ <https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R43053.pdf>

³⁷ <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/egypt-1970-muslim-brothers.html#>

kepada Mubarak. Pada sisi lain, Mursi juga salah dalam menilai loyalitas yang dimiliki oleh Sisi. Bahkan Mursi tidak cukup menghitung kekuatan militer untuk kembali mampu mengorganisir gerakan mereka dalam upaya merebut kekuasaan.

Pada waktu itu, Mursi meminta Muhammad Hussein Tantawi untuk melepaskan jabatannya sebagai Kepala Supreme Council of Armed Forces Mesir. Posisinya akhirnya digantikan oleh Jenderal Fatah Al Sisi yang menurut Mursi pada waktu itu berpihak padanya. Namun nyatanya Mursi salah dalam membaca politik yang justru membuat posisinya malah digulingkan oleh Jenderal Sisi hanya dalam satu tahun masa kekuasaan. Para pengamat menilai bahwa IM tidak cermat dan menyepelekan kemampuan militer untuk dengan cepat melakukan reorganisasi sehingga menjadi kuat. Pada aspek lain IM juga terlalu percaya jika Sisi berada dipihak mereka dan bisa diandalkan. Suatu kesalahan fatal bagi IM dalam politik yang justru harus dibayar dengan harga yang sangat mahal.

b. Penguatan Sipil - Konstitusi Baru Mesir

Konsekuensi dari upaya Mursi melemahkan militer dalam politik adalah sebagai bentuk dari keinginannya untuk memperkuat posisi sipil. Selama ini dalam term demokratisasi, penguatan sipil merupakan suatu keharusan dimana hanya dengan sipil pemerintahan yang demokratis dinilai akan bisa dijalankan. Militer dianggap sebagai lembaga yang kaku dan penuh dengan aturan hirarki sehingga membatasi kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat.

c. Upaya Islamisasi Mesir

Dalam berbagai pidato yang disampaikannya, Mursi sering mengatakan bahwa ia ingin menjadi pemimpin bagi semua masyarakat Mesir, baik muslim maupun non muslim. Namun dalam realitanya banyak yang menilai terutama musuh-musuh politiknya, bahwa Mursi tidak berpihak kepada semua golongan. Lebih lanjut, berbagai keinginan Mursi ini bahkan

dinilai sebagai bentuk kesombongan gerakan IM ketika sedang berkuasa. IM dinilai tidak mampu melakukan konsensus dengan gerakan lain yang sebenarnya juga mempunyai kekuatan cukup besar di Mesir.

Hal ini dinilai merupakan penghianatan dari Mursi yang berjanji untuk menjadi presiden Mesir bagi semua golongan, baik wanita, kristen koptik, para pemuda, dll. Berbagai gerak gerik dari Mursi dinilai sebagai upaya untuk meng-IM kan Mesir pada berbagai bidang dan tempat seperti sekolah, pengadilan, perusahaan negara, rumah sakit dan negara. Suatu bentuk dominasi politik yang sulit diterima oleh kelompok oposisi³⁸.

d. Upaya Mendukung Palestina

Bahkan sejak kampanye, salah satu semangat yang disampaikan oleh Mursi adalah upaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dinyatakan bahwa misi dari Mursi adalah untuk mendukung Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka sebagai gambaran kembalinya hak mereka yang legitimate, sehingga dengannya Palestina akan mendirikan negara mereka sendiri dan mampu membebaskan tanah mereka dari penjajahan bangsa Yahudi.

Dari gambaran di atas maka terlihat jelas bagaimana dukungan Mursi terhadap bangsa Palestina. Apalagi Hamas yang getol memperjuangkan kemerdekaan Mesir tidak lebih dari sayap gerakan IM di negeri para nabi ini. Jadi meskipun dalam implementasinya belum banyak yang dilakukan oleh Mursi untuk mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi banyak pihak utamanya Israel dan Amerika tidak menyukai kekuasaan Mursi.

³⁸<https://www.lwbooks.co.uk/journals/soundings/pdfs/s54%20gerbaudo.pdf> page 105

L. IM DAN ANCAMAN KEPENTINGAN AMERIKA

Selain berbagai kebijakan tersebut, Mursi juga dinilai telah mengangkat beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin sebagai aktor strategis dalam pemerintahan Mesir. Ketika melakukan reshuffle pada Agustus 2012, Mursi menempatkan empat orang anggota ikhwanul muslimin dalam pemerintahannya. Demikian juga pada 22 November 2012, Mursi juga mengeluarkan dekrit yang memberikan kekuasaan bagi dirinya untuk mengendalikan pemerintahan dan berada pada puncak kekuasaan.

Berbagai kebijakan yang diambil oleh Mursi tersebut dinilai tidak hanya merugikan bagi kelompok oposisi, melainkan juga menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika. Dimana bagi Amerika Mursi akan menggagalkan kerjasama intelegen yang selama ini sudah mereka bangun. Padahal untuk keperluan tersebut, Amerika telah mengeluarkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Karenanya jika Mursi tidak bisa menjadi aliansi yang baik bagi Amerika, dana yang dikeluarkan tidak akan digunakan sesuai dengan yang mereka inginkan. Dalam perkara sharing intelegen, biasanya yang diinginkan oleh Amerika adalah mengawasi berbagai gerakan Islam yang mereka indikasikan sebagai aktor terorisme.

Selain itu, hal lain yang juga sangat penting bagi Amerika adalah untuk mengamankan posisi Israel sebagai negara aliansinya yang berada di tanah arab. Hal ini menjadi perkara yang serius bagi Israel dikarenakan pada masa Mursi, gerakan manusia dari Rafah menuju daerah Gaza menjadi jauh lebih mudah. Hal ini dinilai akan menjadi sarana bagi transfer persenjataan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin terhadap Hamas yang mempunyai ideologi yang sama. Berbagai pergerakan di perbatasan yang selama Mubarak diawasi dan bahkan dilarang menjadi bisa dengan lebih leluasa menembus perbatasan di masa Mursi³⁹. Jika persoalan ini tidak segera ditangani, maka ada kekhawatiran bahwa posisi Hamas akan

³⁹ <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/10/egypt-coup-palestinians-morsi-gaza>

menjadi semakin kuat, yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi Israel.

Beberapa hal di atas belum termasuk kepentingan Amerika lainnya yang terancam dengan kekuasaan Mursi sebagai representatif kelompok muslim di Mesir. Di antara hal yang menakutkan tersebut adalah peluang munculnya semangat untuk melakukan unifikasi Sudan Selatan dan Utara. Bagi Amerika hal ini tentu merugikan karena Sudan selatan merupakan negara yang kaya minyak dan bisa menjadi sekutunya. Demikian juga berkaitan dengan upaya Amerika untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan melakukan “penguasaan” terhadap terusan Suez. Adapun dalam misi keagamaan, Amerika juga merasa terancam dalam upaya penguatan kristen koptik di Mesir dengan semakin menguatkan kekuasaan dan pengaruh Mursi.

M. KUDETA DAN KEKACAUAN POLITIK MESIR

Maka berdasarkan kompleksitas persoalan sebagaimana dijelaskan di atas, akhirnya kelompok oposisi yang dikomandoi oleh beberapa kelompok yang menentang Mursi seperti militer, kelompok sekular dan kristen koptik menyusun kekuatan mereka untuk bisa menghadapi Mursi. Posisi mereka pun menjadi semakin kuat karena apa yang mereka inginkan mendapat angin segar dengan munculnya dukungan dari Amerika dan Israel.

Apa yang dilakukan oleh kelompok anti Mursi ini dinilai sebagai respon dari apa yang terjadi di Mesir. Bahkan mereka menunjukkan data bahwa konflik sektarian mengalami peningkatan pada masa Mursi. Selain itu, Mursi juga dinilai tidak bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini berkembang. Dengan berbagai kondisi yang berkembang sebagaimana digambarkan di atas, maka akhirnya pada tanggal 3 Juli 2013, akhirnya kekuasaan Mursi pun direbut oleh militer Mesir dibawa komanda Jend. Sisi.

Sebelumnya berbagai kelompok ini telah melakukan konsolidasi yang intensif. Karenanya berbagai kalangan seperti militer, ulama besar Al Azhar Ahmad El Tayib dan pimpinan kelompok oposisi Muhammad El Baradai mulai mengkonsolidasi massa untuk melakukan penentangan terhadap Mursi. Di antara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan demonstrasi besar-besar menentang Mursi, termasuk didalamnya dengan mengumpulkan sebanyak mungkin tanda tangan para penentang pemerintah. Pada saat ini juga peran media betul-betul digiatkan. Hanya saja karena dana yang berasal dari Amerika cukup banyak, akhirnya media lebih banyak berpihak kepada kelompok oposisi sehingga mulai terkesan bahwa semua kebijakan yang diambil oleh Mursi merupakan hal yang tidak tepat. Kelompok sekuler pun membenarkan apa yang dilakukan oleh kelompok militer karena menilai bahwa kelompok IM sejauh ini belum mampu bertransformasi menjadi partai yang inklusif, pluralis dan egaliter.

Dengan peta politik yang demikian dan gelombang demonstrasi yang semakin meluas di tengah masyarakat, Mursi pun menilai bahwa kelompok pendukung Mubarak yang ada di balik semua ini. Menurutnya pemerintahan yang terbentuk dengan cara demokratis harus dilindungi dan dipertahankan. Karenanya ia pun siap untuk mengorbankan nyawanya dalam upaya menjaga legitimasi politik yang telah dimandatkan oleh rakyat kepadanya. Namun ternyata upaya yang diinginkannya tidak berjalan optimal. Apalagi banyak orang dekatnya yang justru membelot, terutama dari kalangan militer.

Pada sisi lain kelompok pendukung Mursi pun turun ke jalan dan menyatakan kesiapannya untuk membela sang presiden. Situasi keamanan di Mesir pun mencekam. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 2013, kekuasaannya pun direbut oleh kelompok militer. Jenderal Sisi menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mursi tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat. Oleh karena itu dalam waktu akan diadakan pemilu untuk memilih pemimpin yang terbaik. Sementara kepemimpinan presiden akan digantikan oleh Adly Mansur.

Mendengar pernyataan tersebut, serentang para pendukung Mursi tidak terima. Mereka meneriakan takbir dimana-mana karena merasa proses demokrasi yang selama ini berlangsung sudah dikhianati oleh militer. Mursi pun menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sisi dan para pendukungnya merupakan suatu yang tidak wajar dan menciderai proses demokratisasi yang berlangsung. Namun militer pun tidak menggubris berbagai suara tersebut. Malah beberapa tokoh IM termasuk Mursi sendiri mereka tangkap. Akhirnya kekuasaan yang didapatkan secara demokratis melalui pemilu kembali kepada pemerintahan rejim militer hanya satu tahun setelah ia berkuasa.

N. PERAN AMERIKA DALAM KUDETA MESIR

Hal yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa kudeta terhadap pemerintahan Mursi bukan hanya sekedar isu politik domestik tetapi juga meluas menjadi isu yang dipengaruhi oleh kepentingan internasional. Jika memperhatikan posisi Amerika dalam kudeta yang terjadi di Mesir, maka hal menarik yang terlihat bahwa Amerika tidak seperti yang biasanya terjadi di negara lain, dimana Amerika seringkali menentang dan turun tangan terhadap upaya untuk menurunkan kekuasaan pemerintahan legal yang sedang memerintah sepertinya halnya di Irak, Afghanistan, dan Libya.

Adapun dalam kasus Mesir, maka ketika pemerintahan Mursi dikudeta, Amerika pun hanya diam saja. Memang sempat Obama menyatakan bahwa Amerika tidak terlibat dan punya kepentingan apa-apa terhadap Mesir kecuali terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Namun sudah menjadi rahasia umum sebenarnya bahwa Amerika mempunyai kedekatan tersendiri dengan militer Mesir sejak lama. Bahkan hal tersebut sudah terjalin sejak perjanjian camp david.

Beberapa analisa menyatakan bahwa hal ini tidak terlepas dari sikap anti islam yang dikembangkan dalam politik luar negeri Amerika. Amerika dengan rekan-rekannya dari kalangan liberal dan anti islam pada awalnya memang mencoba

untuk melakukan cara-cara demokratis yang selama ini mereka dengungkan. Hanya saja jika keadaannya sebagaimana yang mereka alami dalam kasus Mesir, maka mereka pun siap untuk melakukan kudeta.

Kelompok militer pada awalnya dengan dukungan kelompok liberal telah mengikuti pemilu dengan partai mereka. Namun dalam realitanya mereka kalah. Hal ini dikarenakan pada masa arab spring, semangat yang muncul adalah upaya untuk melakukan demokratisasi. Di antara maknanya adalah bahwa masyarakat ingin dipimpin oleh pemerintahan sipil dan tidak bertindak dengan cara hirarki, melainkan dengan memberikan ruang kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Oleh karena itu, mereka pun tidak siap terima dan berupaya melakukan kudeta.

Adapun bagi Amerika, upaya ini tentu merupakan langkah yang baik untuk kepentingan mereka. Kelompok Islam yang memerintah, yang dipimpin oleh Mursi, dalam pandangan Amerika bukanlah kelompok yang bisa didikte oleh Amerika. Oleh karena itu, jika ada kelompok yang siap menggantikan kekuasaan dan mereka bisa untuk dikendalikan, maka hal tersebut akan lebih menguntungkan bagi Amerika.

Maka dari sini pula bisa dilihat double standard Amerika dalam menerapkan demokrasi, dimana demokrasi ternyata harus sesuai dengan definisi yang diinginkan oleh Amerika. Tidak memandang apa yang akan terjadi setelah kudeta tadi berlangsung. Yang utama bagi mereka adalah mengamankan berbagai kepentingan strategis yang dimilikinya.

Padahal, ketika terjadi kudeta kondisi juga tidak langsung berubah menjadi aman. Justru resiko kekacauan di tengah masyarakat sangat besar, apalagi merebut kekuasaan dari pemimpin yang terpilih secara demokratis dengan dukungan puluhan juta rakyat. Namun mungkin militer telah menghitung dengan kekuatan senjata yang mereka miliki, bahwa mereka pun akan mampu mengalahkan dan melumpuhkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk mendukung dan mempertahankan kekuasaan presiden Mursi tersebut.

Bagi IM, upaya mengembalikan kekuasaan Mursi merupakan suatu keharusan. Karena merupakan gerakan yang mampu membawa Mursi sebagai presiden yang terpilih secara demokratis di Mesir, IM melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kekuasaan Mursi sebagai presiden legitimate hasil pemilu 2012. Hal inilah yang menyebabkan banak dari anggota gerakan IM yang turun ke jalan untuk menentang kekuasaan militer.

Namun apa yang mereka lakukan justru menyebabkan militer menjadi bertambah brutal. Hal ini misalnya terlihat dari pada bulan Agustus, satu bulan setelah kudeta, yang telah menyebabkan militer membunuh hampir 1000 orang dari para demonstran yang disebut dengan peristiwa Rabaa al-Adawiya and al-Nahda Squares in Cairo. Bahkan lebih dari 20.000 para aktifis IM yang dicebloskan ke penjara.

Keadaan ini pula sebenarnya yang mereka kelolah untuk bisa menjadi sumber inspirasi sebagaimana melakukan penggulingan kembali terhadap rejim militer. Namun upaya tersebut ternyata tidak cukup berhasil mengingat memang militer sudah melakukan upaya antisipasi. Di antaranya adalah bahwa militer sudah membekukan lusinan bisnis yang dimiliki oleh IM. Bahkan pada bulan Agustus 2014, organisasi IM ini pun kembali menjadi organisasi terlarang di Mesir.



BAB 3

NASIB SURAM PERDAMAIAN PALESTINA



A. AKAR PERSOALAN PALESTINA

Konflik Israel Palestina merupakan persaingan dalam mendefinisikan sejarah siapa yang paling berhak untuk menguasai negeri pada nabi ini. Oleh karena itu, ketika bicara tentang konflik Israel Palestina, maka hal ini tidak bisa dipisahkan dari semangat gerakan zionisme. Pada tahun 1897, kongres Zionisme pertama kali diadakan yang dikoordinir oleh Theodor Herzl. Semangat yang mereka munculkan adalah untuk mendirikan negara di tanah bangsa yahudi. Menurut mereka, gerakan zionisme tidak akan pernah berhenti sampai mereka kembali mendapatkan tanah nenek moyang mereka yang sudah lebih dari ribuan tahun dikuasai oleh bangsa arab.

Konflik baru berkembang ketika saat itu pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 bangsa Yahudi sudah mulai datang memasuki negeri Palestina. Salah satu hal yang dianggap sebagai pemicu adalah karena mereka mendapatkan penyiksaan dan diskriminasi dari berbagai bangsa di mana mereka tinggal. Hal ini dikarenakan memang bangsa Yahudi banyak membuat persoalan di negara dimana mereka tinggal.

Puncaknya adalah ketika kemudian kelompok Yahudi yang terdiaspora di berbagai negara mampu untuk mengkoordinasikan diri, sehingga mereka pun bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah Inggris pada waktu itu.

Sebagai konsekuensinya, dikeluarkanlah deklarasi Balfour. Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa, *The British Balfour Declaration promised to create a Jewish homeland in the region comprising the ancient Land of Israel.*

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."

Dari tahun 1920 sd 1947, maka upaya ini semakin mudah dilakukan mengingat suksesnya Inggris dan Prancis dalam menguasai kawasan yang selama ini dibawah kepemimpinan Turki Utsmani. Pada saat itu, posisi Turki Usmani semakin lemah. Kawasan yang selama ini merupakan kekhalifahan umat Islam terbagi menjadi dua, dimana satu bagian dikuasai oleh Prancis dan satu bagian lagi dikuasai oleh Inggris.

Adapun wilayah yang dikuasai oleh Inggris adalah kawasan west bank, Gaza dan Jordan yang sebagian besar merupakan wilayah tanah Palestina. Hal inilah yang kemudian memungkinkan Inggris untuk mengeluarkan deklarasi Balfour. Dimana dalam deklarasi ini, Inggris memberikan mandat kepada bangsa Yahudi yang menjadi korban Holocaust untuk bisa menguasai wilayah Palestina. Maka mereka pun mulai melakukan migrasi ke wilayah ini. Dari tahun ke tahun, jumlah mereka pun menjadi semakin besar, apalagi selama ini bangsa Yahudi sudah mempunyai modal yang cukup besar untuk membeli tanah-tanah yang ada di kawasan Palestina.

Hal inilah yang mungkin pantas disebut sebagai penjajahan melalui ekonomi. Biasanya penjajahan fisik bisa dilakukan ketika ekonomi masyarakat sudah mulai bisa dikuasai. Adapun yang dilakukan oleh bangsa Yahudi adalah dengan

membeli tanah, kemudian membuka usaha dan semakin memperluas wilayah mereka. Ketika faktor-faktor ekonomi tadi sudah mulai dikuasai, maka mereka pun mulai memperluas upaya mereka untuk menguasai politik.

Orang-orang Yahudi pun semakin leluasa untuk menguatkan eksistensinya melalui penguasai wilayah, ekonomi dan politik Palestina. Mereka mulai membangun persiapan-persiapan untuk membentuk sebuah negara. Selain sudah punya organisasi yang rapi, mereka juga sudah punya organisasi politik, dan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan lainnya. Sementara bangsa Arab pada waktu itu tidak bisa melakukan banyak hal mengingat posisi mereka begitu lemah dan masih banyak terpengaruh dengan efek perang dunia I.

Akhirnya, pada tanggal 14 Mei tahun 1948, bangsa Yahudi mendeklarasikan diri sebagai negara mereka, di tanah yang selama ini dikuasai oleh bangsa Inggris. David Ben Gurion pun menjadi perdana menteri pertama. Mereka menjadi semakin yakin bahwa wilayah yang selama ini belum seberapa mereka kuasai akan bisa semakin luas dan menjadikan Israel sebagai negara kuat di kawasan Timur Tengah. Negara yang merupakan hasil aneksasi dari tanah bangsa Arab ini mereka sebut dengan nama negara Israel.

Penamaan ini mempunyai alasan yang kuat karena Israel sendiri merupakan nama nabi Ya'qub yang juga merupakan nabinya kaum muslimin. Bangsa Yahudi mengetahui hal tersebut. Dan memang bangsa Yahudi hakikatnya adalah anak keturunan dari nabi Ya'qub tadi. Secara politis, ketika negara mereka dinamakan Israel, maka hal tersebut juga membuat bangsa Islam yang mengecam tindakan bangsa Yahudi hakikatnya sedang mengecam nabi mereka sendiri. Disinilah salah satu kecerdasan dan kelicikan bangsa Yahudi terlihat.

Yang juga menarik adalah bahwa meskipun jumlah mereka kecil, kecerdasan dan sistem organisasi yang dibuat oleh bangsa Yahudi cukup kuat. Mereka membuat berbagai jaringan dan komunitas di Inggris, Amerika dan berbagai negara lainnya.

Hal ini membuat mereka menjadi sangat kuat. Bukan hanya karena mereka mempunyai ikatan sebagai bangsa Yahudi, tetapi mereka mendapatkan pembelaan dari negara-negara kuat yang sudah bersepaham utamanya dalam hal kepentingan dengan bangsa Yahudi.

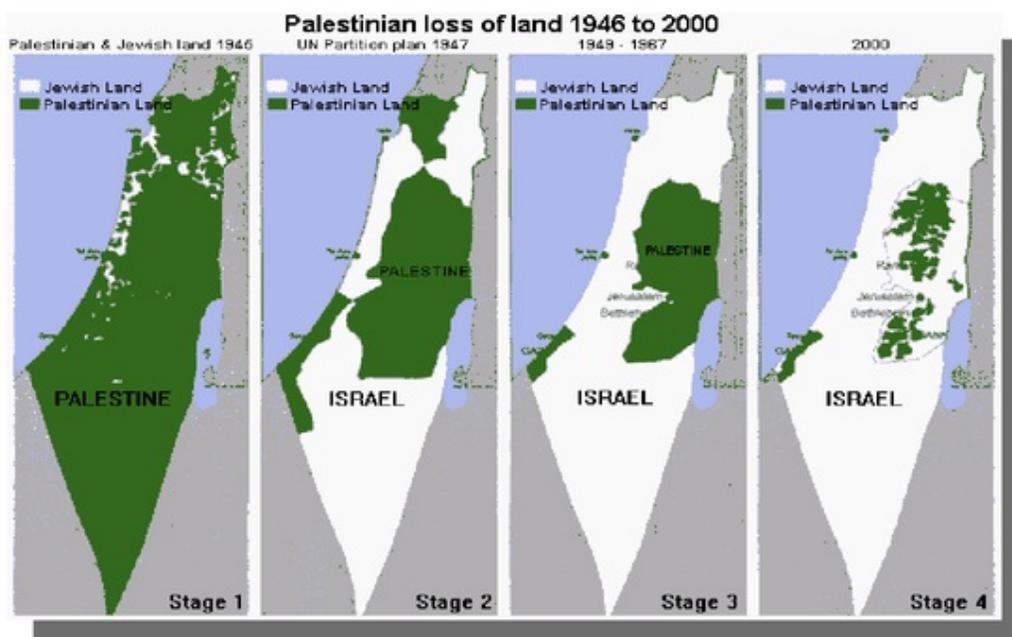
Tindakan bangsa Yahudi ini mendapatkan perlawanan dari bangsa Arab seperti Mesir, Yordania, Libanon, Syiria, dan Irak. Mereka langsung melakukan penyerangan terhadap negara “asing” yang telah merebut tanah yang dimiliki oleh bangsa Arab ini. Perang inilah yang sering disebut sebagai perang pertama Arab Israel. Akhirnya beberapa wilayah pun seperti Gaza dan *West Bank* berhasil direbut oleh bangsa Arab. Namun ketegangan terus berlangsung antara kedua kubu, sampai akhirnya pecah perang besar 6 hari pada tahun 1967.

B. PERKEMBANGAN KONFLIK PALESTINA

Sejak berdirinya negara Israel tahun 1967, kawasan Timur Tengah menjadi semakin tidak stabil. Berbagai konflik mulai terjadi dimana pada satu sisi bangsa Arab ingin membantu saudara mereka sesama bangsa Arab yang terdholimi, dan di sisi lain bangsa Palestina pun mulai membentuk beberapa gerakan untuk memperjuangkan tanah kelahiran mereka. Hal ini di antaranya terlihat dari terbentuknya Palestine Liberation Organization (PLO) pada tahun 1964. Tujuan organisasi ini adalah untuk menghancurkan Israel dan membentuk Palestina sebagai negara di wilayah yang sudah direbut oleh bangsa Yahudi.

Adapun bangsa Arab, paling tidak ada dua perang besar yang mereka lakukan yaitu perang tahun 1948 dan perang selama enam hari tahun 1967. Namun sayang dalam perang kedua, karena besarnya dukungan yang diberikan oleh Inggris dan Amerika terhadap Israel, bangsa Arab pun berhasil dikalahkan. Bahkan beberapa wilayah pun jatuh ke tangan Israel, termasuk kawasan semenanjung Sinai. Bahkan alasan inilah yang akhirnya menjadikan Mesir pun berubah haluan dengan menandatangani perjanjian Camp David.

Ketika Anwar Saddat menjadi presiden, ia pun mulai menghitung bahwa ternyata kerugian yang disebabkan oleh perang ini sangat besar baik secara ekonomi, korban nyawa, maupun kedaulatan bangsa. Akhirnya dengan menandatangani perjanjian Camp David, Mesir mendapatkan kembali wilayah Sinai yang direbut oleh Israel dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk perang. Namun pada sisi yang lain sebenarnya Mesir membayar dengan harga yang sangat mahal karena bangsa ini pun harus mengakui kedaulatan bangsa Israel. Maknanya adalah bahwa perjuangan bangsa Arab pun secara umum akan segera terhenti atau paling tidak susah untuk melakukan banyak perlawanan karena kekuatan mereka pada saat itu lebih tertumpu pada bangsa Mesir.



Adapun bangsa Israel kekuatan mereka semakin besar, dimana wilayah kekuasaan mereka pun menjadi semakin luas. Bahkan wilayah kekuasaan bangsa Palestina pun semakin tercerai karena kawasan mereka pun sudah mulai dipisahkan oleh wilayah yang dikuasai oleh bangsa Yahudi. Terpisahkan wilayah Palestina ini juga memberikan dampak signifikan bagi perpecahan gerakan perlawanan domestik bangsa Palestina terhadap Israel. Gambaran perluasan wilayah Israel dan hilangnya wilayah Palestina terlihat dalam gambar berikut:

C. JALAN PETA DAMAI

Peperangan selama ini sudah menjadi warna bagi penyelesaian konflik antara Israek Palestina. Namun ternyata hal tersebut juga selalu menambah korban dan menyebabkan stabilitas keamanan menjadi semakin tidak terkendali. Dua karakter perjuangan melalui peperangan atau diplomasi juga menjadi dua warna yang berbeda bagi gerakan Hamas dan PLO yang ada di Palestina.

Hamas lebih banyak menggunakan perjuangan bersenjata, sementara PLO lebih banyak menggunakan cara yang bersifat diplomasi. Masing-masing mempunyai alasan yang kuat dengan metode perjuangan yang mereka lakukan. Bagi Hamas, seperti apapun perjuangan dengan bersenjata akan menunjukkan harga diri mereka di hadapan Israel dan dunia Internasional. Lagi pula dalam konteks keislaman, Hamas memahami bahwa perjuangan bersenjata merupakan cara yang terhormat untuk melawan penjajahan. Jika tidak mati syahid, maka bisa hidup mulia.

Adapun pada sisi lain, PLO memandang jika peperangan yang dilakukan lebih banyak mengorbankan rakyat. Perang membuat stabilitas keamanan menjadi hilang sehingga secara politik dan ekonomi pun menjadi semakin tidak terkendali. Tanpa keamanan masyarakat menjadi semakin sulit untuk menjalankan roda ekonomi mereka. Akhirnya, jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan menjadi semakin banyak.

Ada beberapa perjanjian yang sudah ditanda tangai berkaitan dengan upaya membangun hubungan yang lebih baik bagi kedua negara dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik yang berkepanjangan. Namun dalam realitanya, berbagai kesepakatan tersebut belum bisa menjadi solusi bagi penyelesaian konflik kedua negara. Di antara kesepakatan yang sudah dihasilkan adalah perjanjian Camp David sebagaimana telah diuraikan di atas.

Selain itu ada juga perjanjian Oslo, yang mana dalam perjanjian ini disepakati beberapa hal seperti upaya untuk membangun perdamaian sementara bersama dan saling memahami antara satu dengan lainnya. Selain itu, Israel pun sepakat untuk menarik pasukan mereka yang berada di wilayah Gaza dan West Bank. Dengan adanya komunikasi yang terus dibangkit dalam proses perundingan ini, diharapkan pada tahun 1996, perdamaian yang merupakan produk kesepakatan bersama bisa dicapai pada tahun 1996.

Hanya saja, dalam realitanya perjanjian ini tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya rasa saling percaya antara satu dengan lainnya. Pada satu sisi, Israel beranggapan bahwa Palestina tidak mungkin akan menghormati hasil perjanjian karena image yang muncul dalam pandangan mereka bahwa bangsa Palestina tidak lebih dari kelompok teroris. Akhirnya perjanjian ini dinilai sebagai sebuah kesepakatan yang gagal.

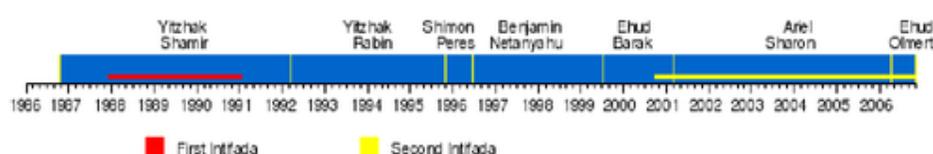
D. HAMAS VS FATAH

Salah satu hal yang juga mempersulit penyelesaian konflik israel palestina adalah karena terjadinya perbedaan dalam memandang strategi menghadapi Israel dalam penyelesaian konflik. Hamas yang senantiasa menawarkan cara bersenjata dalam menghadapi Israel dinilai sebagai salah satu hambatan dalam proses perundingan. Seringkali Israel menjadikan gerakan Hamas di Gaza sebagai alasan untuk mengingkari perjanjian yang mereka buat. Alasannya adalah bahwa keamanan mereka tidak terjamin dengan serangan Hamas yang seringkali dilakukan.

Kondisi ini akhirnya juga mengganggu hubungan antara Hamas dan Fatah. Fatah tidak menerima bahwa apa yang mereka lakukan dihancurkan oleh Hamas. Bagi mereka perjanjian telah menghabiskan energi, biaya dan waktu tidak sedikit, tetapi akhirnya berakhir begitu saja karena keberadaan Hamas. Adapun Hamas, mereka pun punya argumen bahwa

yang dilakukan oleh Fatah dalam perjanjian secara tidak langsung sudah mengakui eksistensi bangsa Israel. Padahal selama ini hal mendasar yang menjadi landasan perjuangan adalah untuk menganggap keberadaan Israel sebagai negara sebagai sesuatu yang ilegal.

Karena itu, selama ini Hamas lebih memilih gerakan perlawanan yang mereka sebut sebagai gerakan intifadah. Suatu perlawanan yang menjadi gambaran kekecewaan mereka terhadap penjajahan Israel yang telah dilakukan selama puluhan tahun. Selama itu pula bangsa Palestina menurut mereka mengalami berbagai kesulitan yang bertubi. Gambaran perjuangan ini terlihat dalam gambar berikut:



Akibat dari penjajahan Israel telah membuat jutaan masyarakat Palestina terpaksa mengungsi, ratusan ribu telah terbunuh. Belum lagi dilihat dari stabilitas ekonomi yang tidak bisa mereka kembangkan dengan baik karena persoalan keamanan yang sangat mencekam. Sangat banyak penduduk negeri ini pun yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Bahkan ketika sebagian ingin keluar dari negerinya, mereka pun mempunyai masalah di perbatasan.

Makanya, bagi kelompok Hamas, melawan Israel harus dengan semangat agama. Hal ini dikarenakan agama juga yang menjadi alasan bagi Israel untuk menarik dukungan dari kaum yahudi di berbagai belahan dunia untuk datang ke Palestina, yaitu dengan semangat zionisme. Karena itu, semangat yang dimunculkan adalah upaya untuk mempertahankan masjidil aqso dari penguasaan bangsa Israel. Menurut kelompok intifadah ini apa yang selama ini mereka dapatkan dari Israel merupakan perlakuan yang tidak adil.

Kedua pandangan ini sebenarnya tidak terlepas dari pengalaman sejarah dan geopolitik dari masing-masing gerakan. Fatah berasal dari kawasan west bank, sementara hamas dari kawasan Gaza. Karakter masyarakat dan perkembangan politik di kedua kawasan juga berbeda yang akhirnya membuat pola penyikapan dari masyarakat Palestina pun tidak sama. Kondisi yang pada akhirnya membuat posisi bangsa Palestina menjadi bertambah lemah dalam berhadapan dengan bangsa Israel.

Singkat cerita, berbagai persoalan tadi terus berkembang di Palestina dan membuat berbagai masalah kemanusiaan berlangsung. Bangsa ini seakan kehilangan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa “sepertinya konflik ini sulit selesai sampai hari kiamat pun datang”.

E. KONFLIK PALESTINA PASCA KUDETA MESIR

Utamanya setelah terjadi kudeta Mesir pada tahun 2013, kondisi keamanan di Palestina semakin memburuk. Bahkan ketika bulan Ramadhan tahun 2014 yang lalu, dengan membabi buta Israel menyerang umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah mereka di masjid-masjid. Tindakan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.

Di bulan ramadhon tahun lalu, masyarakat muslim di berbagai penjuru dunia termasuk di Palestina berduyun-duyun pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Namun ternyata, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Baru saja ramadhon dimulai, serdadu Yahudi Israel melakukan penyerangan secara membabi buta kepada para jama'ah masjid di Palestina yang sedang melaksanakan sholat tarawih. Dalam serangan ini, tentara Israel menggunakan tembakan meriam yang membuat suasana riuh, dan gas air mata yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami sesak nafas, terutama wanita dan anak-anak. Selain itu, berbagai pesawat tempur dengan tembakan bom yang mereka hujamkan mendadak membuat kota Gaza yang gelap berubah terang benderang.

Serangan ini pun tidak hanya sekali saja mereka lakukan, tetapi selama beberapa hari di awal bulan ramadhon. Akibatnya, berbagai kerusakan infrastruktur yang belum bisa dihitung terlihat dimana-mana. Korban luka, maupun meninggal berjatuh. Bahkan tidak sedikit yang ditangkap dan dijadikan sebagai tawanan. Lebih dari itu, dampak psikologis dari serangan ini sangat terasa. Gaza berubah seperti kota mati karena masyarakat masih takut untuk beraktifitas sebagaimana biasanya. Mereka khawatir jika tentara Israel melakukan serangan secara tiba-tiba.

Demikianlah kondisi terkini yang dihadapi oleh penduduk Gaza. Ramadhon mereka tidak lagi seindah ramadhon di negeri-negeri Islam lainnya. Waktu yang seharusnya menjadi kesempatan bagi mereka untuk beristirahat dari semua kelelahan dunia pun selalu diganggu oleh serangan tentara yahudi Israel.

Bagi Israel, penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina berubah kesulitan ekonomi, tekanan politik, keterbatasan makanan, dan berbagai kesulitan fisik lainnya belum cukup untuk memenjarahkan masyarakat Palestina. Israel menyadari bahwa masyarakat Palestina masih merdeka dan begitu sulit untuk dihancurkan. Dan mereka tahu kuncinya adalah karena kedekatan mereka pada Allah ta'ala.

Israel tidak rela jika masyarakat Palestina betul-betul lepas dari semua dahaga dan kesulitan hidup selama ini. Oleh karena itu, tidak cukup bagi mereka mempersulit masyarakat Israel dari hal fisik, tetapi juga perlu menjauhkan mereka dari spiritual yang kuat. Karena itu, rasa nyaman bagi masyarakat Palestina untuk beribadah mereka kacaukan. Israel tahu bahwa ruh Islam inilah yang akan membuat mereka pantang menyerah dan terus berjuang melawan semua kesulitan.

Meskipun demikian, dalam membangun opini publik, Israel selalu membangun justifikasi yang rasional untuk menjadi image positif mereka. Ketika terjadi penyerangan ini, maka mereka menyampaikan bahwa yang dilakukan tentara Israel tidak lebih dari upaya menuntut keadilan atas hilang dan

terbunuhnya tiga orang pemuda Israel pada tanggal 12 Juni 2014.

Padahal jika dicermati, penyebab serangan ini adalah dikarenakan adanya tiga pemuda Israel yang terbunuh di daerah sungai Jordan yang jauh dari wilayah Gaza. Lagi pula, Israel membalas terbunuhnya tiga orang ini dengan serangan yang mengakibatkan puluhan bahkan ratusan atau pun ribuan nyawa masyarakat Palestina hilang. Padahal belum jelas siapa sebenarnya yang menyebabkan tiga orang yahudi tersebut meninggal.

Namun demikianlah karakter bangsa Yahudi. Tiba-tiba saja mereka menjustifikasi bahwa terbunuhnya tiga pemuda Israel tersebut pasti disebabkan oleh mujahid Palestina. Selama tiga minggu mereka mengarahkan serangan ke daerah tepi barat, baru kemudian di awal ramadhon memindahkan serangannya ke jalur Gaza. Kekuatan yang dikerahkan pun cukup lengkap yaitu 40 roket dan kekuatan tentara lengkap mengelilingi wilayah gaza⁴⁰.

Dalam hukum Internasional, apa yang dilakukan oleh tentara Israel adalah kejahatan kemanusiaan. Namun, nyatanya mereka yang selama ini berteriak menuntut keadilan atas nama HAM, termasuk PBB sekali pun hanya bisa diam menyaksikan kondisi seperti ini. Berbeda halnya ketika aktor penyerangan adalah dari kelompok Islam. Atas nama kepentingan, politik Internasional menggambarkan suasana ketidakadilan yang begitu kentara. Dunia Islam pun seperti kehilangan suara. Mereka membiarkan serangan Israel ke wilayah Palestina seperti permainan yang kapan saja bisa dilanjutkan sebagai rutinitas.

Ketika ada sedikit kondisi yang telah membuat masyarakat Palestina tenang atau Israel mengalami suatu kesulitan, maka segera saja tentara Israel melakukan penyerangan terhadap masyarakat Palestina. Akibatnya sudah tidak terhitung berapa banyak nyawa yang hilang, anak-anak

⁴⁰http://www.nytimes.com/2014/07/04/world/middleeast/palestinian-militants-and-israel-trade-attacks.html?_r=0

yang kehilangan ayah, istri yang menjadi janda, belum termasuk berbagai kerusakan lainnya.

Seakan-akan kondisi menuntut mereka seperti itu. Ketika masyarakat Palestina balik melakukan perlawanan – tentu dengan senjata seadanya -, dunia Internasional berteriak bahwa telah terjadi serangan terorisme. Opini publik Internasional pun tidak objektif karena lebih kental dan sering diwarnai oleh kepentingan Israel. Hampir selalu klaim Israel yang dibenarkan dan masyarakat Palestina berada pada posisi yang salah.

Kejadian ini bukan hanya satu atau dua kali saja, bahkan sudah menjadi pola sepanjang sejarah Israel Palestina. Wajar jika isu konflik Israel Palestina susah diprediksi kapan akan berakhir. Palestina betul-betul pada posisi yang sulit menghadapi musuh yang mempunyai berbagai sifat keburukan seperti membunuh nabi, menipu, merebut tanah orang, menghancurkan tempat ibadah, menolakan kebenaran dan semua kesesatan lainnya. Karakter ini membangun prinsip bagi Israel bahwa serangan dapat dilakukan kapan saja, termasuk di tengah genjatan senjata sekali pun.

Masalahnya, ternyata tabiat Yahudi Israel tersebut sesuai dengan kepentingan banyak pihak, terutama Amerika. Bagi Amerika, bagaimana pun konflik di kawasan Timur Tengah harus tetap berlangsung karena hal tersebut menjadi pintu bagi mereka untuk meraih berbagai kepentingan di kawasan kaya minyak ini. Apalagi dunia Islam, terutama di kawasan Timur Tengah juga tidak sepenuhnya mendukung posisi Palestina. Hal ini misalnya terlihat dari kembali berkuasanya militer di Mesir yang notabene adalah sekutu Amerika dan Israel. Keadaan ini tentu akan mempersulit posisi Gaza, karena akan menutup peluang datangnya bantuan dari negari sungai nil, baik ekonomi maupun persenjataan.

Demikian juga dengan perkembangan isu Suriah yang tidak kunjung selesai, bahkan posisi Bashar Al Ashad yang kembali kuat. Banyak di antara negeri Islam mengarahkan perhatian mereka ke Suriah karena dianggap sebagai isu

kemanusiaan baru dan lupa dengan Palestina yang sudah seakan menjadi peristiwa konflik biasa.

Belum lagi konspirasi yang dibangun oleh kelompok syiah Iran. Hal ini juga melemahkan pemahaman masyarakat dunia Islam lainnya untuk memahami peta politik yang sebenarnya berkembang di Timur Tengah. Dengan berbagai bantuan yang "seakan" ia beritakan ke Palestina dan penentangan keras terhadap Amerika, pada saat yang sama, Iran sebenarnya sedang melakukan banyak upaya kerjasama yang memperkuat posisi Amerika dan Israel.



BAB 4

KAITAN KUDETA MESIR DENGAN ISU PALESTINA



Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, jelas terlihat bahwa isu kudeta Mesir dan konflik Israel Palestina merupakan dua isu berbeda tetapi terikat antara satu dengan lainnya. Data sebelumnya juga menunjukkan bahwa pasca kudeta Mursi di Mesir, konflik di Palestina mengalami peningkatan. Bab ini akan menganalisa pola hubungan dari kedua isu tersebut.

A. SEJARAH KETERIKATAN ANTARA MESIR DAN PALESTINA

Jika bicara tentang sejarah, maka kita akan melihat bahwa isu konflik Israel Palestina tidak bisa dipisahkan dari sejarah Mesir, utamanya pada masa Nasser. Pada waktu itu, Mesir dikenal sebagai pemimpin bangsa arab, dan Nasser menginisiasi lahirnya Pan Arabism. Gerakan ini bertujuan untuk menghimpun kekuatan bangsa arab agar bisa bersatu kemudian mengusir Israel yang mengokupasi tanah milik bangsa Palestina.

Hal inilah yang membuat Mesir pun terlibat dalam beberapa kali peperangan melawan Israel. Meskipun dalam realitanya berbagai peperangan tersebut tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hal ini sudah cukup untuk menjadi gambaran keterikatan yang kuat secara psikologis antara Mesir dengan Palestina.

Bagi bangsa Palestina, perjuangan yang dilakukan oleh Mesir pada masa Nasser dengan perang 1948 dan 1967 untuk mendukung Palestina merupakan utang budi yang sangat berarti. Namun sayang, sejak Anwar Sadat menandatangani perjanjian Camp David dan diteruskan dengan kekuasaan Husni Mubarak, posisi Mesir justru berubah. Mesir malah menjadi negara aliansi bagi Amerika dan Israel yang sulit diharapkan perannya untuk membantu perjuangan bangsa Palestina.

Mesir tidak cukup kuat untuk menolak bantuan ekonomi yang telah didupakannya dari pemerintah Amerika yang memang mempunyai kepentingan strategis dalam bersekutu dengan Israel dan Mesir. Bagi Mesir secara pragmatis aliansi ini terlihat menguntungkan, tetapi hakikatnya sedang memperkuat kekuasaan bangsa Israel dan melemahkan bangsa Palestina. Ketika tidak mendapatkan dukungan Mesir, negara-negara Arab yang lain juga sulit diharapkan perannya. Akhirnya masyarakat Palestina pun harus berjuang mandiri dalam upaya meraih kemerdekaan. Kondisi ini pula yang akan justru memunculkan perpecahan pada gerakan perjuangan domestik antara Hamas dan Fatah.

B. CAMP DAVID DAN SURAMNYA KEAMANAN PALESTINA

Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwa setelah menyadari ketidakungkinan untuk terus melakukan perlawanan, pasca kekalahan Mesir dalam perang enam hari 1967 melawan Israel, maka setelah Anwar Saddat menduduki posisi sebagai presiden Mesir, ia pun mengambil langkah untuk

bernegosiasi. Langkah yang sebelumnya tidak pernah sekali pun diambil oleh negara arab lainnya.

Hal ini dimulai dengan kunjungan yang dilakukan oleh Anwar Saddam menemui perdana menteri Israel Israel pada tanggal 19 sd 21 November 1977. Dalam pertemuan tersebut keduanya membicarakan upaya untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina termasuk kaitannya dengan posisi Mesir. Kunjungan ini pula yang merupakan kunjungan pertama yang dilakukan oleh pemimpin Arab terhadap Israel. Karena itu, Saddat dinilai sebagai “man of the year for 1977”.

Namun nyatanya setelah kunjungan tersebut, juga bahkan sampai satu tahun tidak terdapat perkembangan berarti sebagai implementasi dari kesepakatan mereka. Baru kemudian presiden AS, Jimmy Charter, mengambil inisiatif untuk mempertemukan presiden Mesir Anwar Sadat dengan perdana menteri Israel Menachem Begin di Camp David (Maryland) pada tanggal 5 September 1978. Perundingan yang berlangsung sampai dua hari tersebut akhirnya menghasilkan keputusan yang mereka tanda tangani di gedung putih dengan kesepakatan.

Dalam deklarasi ini maka disebakati bahwa hanya dalam tiga bulan, Israel akan segera mengembalikan kawasan semenanjung Sinai kepada mesir. Dan kedua negara pun sebagai konsekuensinya akan siap untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara damai. Kedua negara bersepakat bahwa kedepak akan saling bekerjasama dalam penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi. Dan makna yang lebih mendalam dalam perjanjian ini artinya bahwa Mesir mengakui kedaulatan bangsa Yahudi dan menghormatinya. Karena itu, setelah perjanjian ini mereka punya komitmen untuk tidak lagi saling melakukan penyerangan antara satu dengan lainnya.

Demikian isi perjanjian Israel dan Mesir yang disaksikan oleh presiden Amerika, Carter. Karena perjanjian ini pula, Sadat dan Begin mendapatkan hadiah nobel perdamaian pada tahun 1978. Suatu penghargaan yang sangat bergengsi bagi mereka yang punya peran besar dalam mewujudkan perdamaian

dunia. Apalagi dalam hal penyelesaian konflik Israel Palestina yang sebelumnya sudah berlangsung sudah cukup lama.

Pada satu aspek kelihatan bahwa perjanjian Camp David mampu menurunkan tensi antara Mesir dan Israel yang sebelumnya mewarnai peta politik Timur Tengah. Namun sebenarnya jika dilihat dalam aspek kepentingan bangsa Palestina, maka perjanjian ini justru banyak merugikan. Dengan pengakuan kedaulatan Israel oleh Mesir, Palestina kekurangan dukungan dari bangsa yang selama ini banyak membantu mereka.

C. KETERKAITAN HAMAS DENGAN IM DI MESIR

Sebagaimana diketahui, Hamas dinilai sebagai gerakan garis keras dalam perjuangan kemerdekaan di Palestina. Gerakan ini sebenarnya merupakan cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang memang merupakan gerakan transnasional. Hampir di berbagai negara Islam gerakan IM mempunyai cabang dan menunjukkan identitas mereka. Meskipun demikian, dalam realitanya masing-masing gerakan tadi akan menyesuaikan dengan konteks lokalitas di mana mereka berada.

Dalam hal Hamas yang ada di Palestina misalnya, pada awalnya gerakan ini menjelma sebagai partai politik dan mampu memenangkan suara dalam pemilu 2005. Namun nyatanya kemenangan tersebut dipersoalkan karena ideologi mereka yang diidentikkan dengan terorisme. Akhirnya, mereka pun mulai semakin tidak percaya dengan politik dan lebih banyak mengambil jalan yang sifatnya non legal formal. Perjuangan bagi Hamas lebih banyak melalui perang, daripada sekedar berdiplomasi dengan Israel yang dinilai terbiasa tidak menepati janji.

Ketika IM menjadi partai berkuasa di Mesir, sebenarnya ada secercah harapan untuk kondisi politik yang lebih baik baik bagi kehidupan bangsa Palestina. Apalagi dalam banyak pidato yang disampaikan, Mursi sangat menekankan

komitmentnya untuk membantu bangsa Palestina agar bisa mendapatkan kemerdekaan mereka. Meskipun belum secara utuh, tetapi peluang untuk terjadinya komunikasi antara gerakan IM di Mesir dan Hamas mulai terbuka pada waktu itu.

Alasan ini pula sebenarnya yang dijadikan alasan oleh Amerika untuk mendukung penggulingan kekuasaan Mursi dari jabatannya sebagai presiden. Kelompok Islamis yang berkuasa di Mesir dinilai tidak akan mampu menghalangi keberadaan bangsa Israel. Artinya sangat mungkin senjata akan masuk kepada bangsa Hamas yang selama pemerintahan Mubarak tidak mungkin terjadi. Jika senjata masuk ke Hamas, posisi Israel akan semakin sulit. Hanya dengan berperang dengan batu saja, perjuangan intifadah yang dilakukan oleh kelompok ini sudah cukup membuat bangsa Yahudi merasa kewalahan.

a. Isolasi Hamas Post Kudeta Mesir

Akhirnya, pasca kudeta yang terjadi di Mesir dan kekuasaan kembali dikuasai oleh militer, maka perbatasan antara Mesir dan Gaza kembali ditutup secara total. Peluang untuk adanya komunikasi yang intensif dari para aktifis IM dan Hamas menjadi hampir tidak mungkin dilakukan. Hal ini pada akhirnya membuat kekuatan Hamas yang sudah mulai terbuka di era Mursi kembali terisolasi.

Berbagai rasionalitas juga dimunculkan untuk mendukung kebijakan penutupan daerah perbatasan tersebut. Di antaranya adalah dikarenakan Hamas yang sudah dikategorikan sebagai gerakan teroris. Dengan demikian gerakan mereka pun perlu di batasi dan di awasi. Kondisi ini berbalik dari keadaan Palestina ketika Mesir baru saja memilih Mursi sebagai presiden secara demokratis. Sampai-sampai pada waktu itu beberapa pimpinan Hamas mendatangi pimpinan IM untuk memberikan ucapan selamat. Bagi mereka ini merupakan kesempatan untuk membangun kerjasama yang lebih baik⁴¹.

⁴¹ <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/fall-egyptian-brotherhood-trouble-hamas.html>

Bahkan pada masa kekuasaannya, Mursi sempat mengadakan pertemuan dengan Hamid Haniyeh selaku pimpinan Hamas. Sayang berbagai rencana yang sudah mereka bangun untuk membangun regional aliansi tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Mursi tidak lama menduduki jabatannya. Padahal sebelumnya Hamas sudah berharap banyak dan menilai kemenangan IM di Mesir sebagai sebuah perkembangan yang sangat positif bagi masa depan bangsa ini ke depan.

b. Kebijakan Morsi dan Keamanan Israel

Selama menjabat sebagai presiden Mesir, maka paling tidak ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Mursi, di antaranya adalah upaya untuk membangun proses perdamaian bagi bangsa Palestina⁴². Konsekuensi dari keinginannya tersebut adalah bahwa pola hubungan Mesir dengan Israel mengalami perubahan dibandingkan dengan apa yang terjadi pada masa Husni Mubarak. Hal ini bisa dipahami karena secara domestik, Mesir juga mengalami paling tidak dua hal perubahan signifikan.

Pertama, telah terjadinya perubahan struktur elit yang ada di Mesir. Ketika elite Mesir merupakan orang-orang yang oleh Mc Kirk, salah seorang senator Amerika, disebut Islamis, maka pengaruh tersebut juga dirasakan dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di antaranya misalnya berkaitan dengan hubungan Mesir dengan Israel, dimana dalam sebagian opini publik yang berkembang di dunia Islam, isu konflik Israel Palestine merupakan konflik Islam dan Yahudi. Karena itu, dalam kaitan dengan isu ini, para pemimpin Mesir pun mengambil arah kebijakan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Mubarak selama ini.

Kedua, konsekuensinya adalah hubungan para elitis dan kelompok ikhwanul muslimin lebih dekat dengan Hamas dan kelompok Islam lainnya. Hal ini pada akhirnya juga

⁴² <http://www.e-ir.info/2013/12/12/president-morsi-egypt-and-israel/>

memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola hubungan Mesir dan Israel.

Namun akhirnya, pola tersebut lagi-lagi terhenti seketika dan kembali kepada arah kebijakan yang diambil oleh militer selama ini ketika Mesir kembali dikuasai oleh militer. Jenderal Sisi yang meng kudeta Mesir tidak mungkin akan meneruskan kebijakan Mursi, sementara ada beberapa keuntungan yang selama ini sudah dinikmati oleh kelompok militer ketika mereka menjadi aliansi Amerika dan Israel.

c. Keterkaitan Geografis dan Perbatasan

Selain beberapa faktor di atas, keterkaitan yang dimiliki oleh Mesir dengan Palestina juga berkaitan dengan posisi geografis kedua negara yang langsung berbatasan. Daerah semenanjung Sinai yang menjadi wilayah Mesir langsung berbatasan dengan daerah Gaza di Palestina. Hal ini pada masa kekuasaan Mursi ditakutkan oleh Amerika dan Israel menjadi sarana untuk melakukan transfer senjata. Jika hal tersebut terjadi tentu akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan Israel.

Makanya dengan dikudetanya pemerintahan Mursi oleh militer, peluang tersebut menjadi tertutup sudah. Jenderal Sisi langsung mengambil kebijakan untuk mengamankan wilayah perbatasan demi keamanan negara sekutu mereka. Hal ini tentu akhirnya memupus harapan dari kelompok Hamas yang selama ini menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel untuk memperkuat persenjataan dan dukungan dari luar negeri lainnya.

d. Kudeta Mesir Dan Ancaman Keamanan Palestina

Berbagai data dan uraian di atas, mengindikasikan bahwa kudeta Mesir sudah menjadi ancaman besar bagi keamanan Palestina. Konflik yang selama ini terus berlangsung meningkat intensitasnya ketika Mursi turun dari kekuasaannya. Korban jiwa pun bertambah, belum termasuk berbagai

kerusakan infrastruktur dan mandegnya kegiatan ekonomi masyarakat. Lebih-lebih dilihat dalam konteks kemanusiaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terlihat jelas bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dengan menyerang umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah tarawih pada bulan ramadhan tahun 2014 yang lalu.

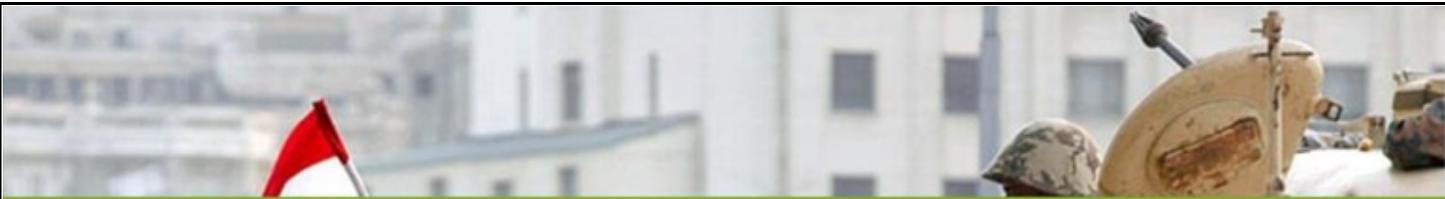
Di tengah semakin melemahnya posisi bangsa Palestina karena berbagai tekanan dan terputusnya bantuan dan harapan yang lebih baik untuk mereka dapatkan pada masa pemerintahan Mursi, justru Israel mampu untuk semakin memperkuat diri. Dalam peperangan, kelemahan lawan menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan diri. Apalagi gerakan yang mereka lakukan dengan dukungan Amerika sangat sistematis.

Amerika tidak perlu menurunkan pasukan sebagaimana yang pernah dilakukan di Irak dan Afghanistan, tetapi cukup dengan menggerakkan kelompok lokal yang bisa diajak bekerjasama. Hanya dengan keluar modal sedikit dibandingkan mereka harus melakukan penyerangan langsung, Amerika dan Israel sudah mendapatkan keuntungan yang banyak. Penyerangan bukan hanya mahal secara biaya ekonomi, tetapi juga harus dibayar dengan citra negatif sebagai bangsa yang tidak demokratis. Padahal selama ini sebagaimana sudah dimaklumi, Amerika dianggap sebagai negara paling demokratis di dunia.

Maka wajar ketika ada sebagian yang berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam kudeta Mesir sebenarnya merupakan upaya untuk mengembalikan komitmen Mesir dan Israel dalam perjanjian Camp David. Kedua negara kembali bisa saling mendukung dan melindungi kedaulatan masing-masing, tetapi tentu akan merugikan kelompok Palestina. Termasuk di dalamnya adalah semakin sulitnya posisi kelompok IM yang bahkan kembali menjadi partai terlarang di Mesir. Pasca kudeta, kelompok IM dilarang untuk kembali melakukan pertemuan-pertemuan sebagaimana yang selama pemerintahan Mursi sering mereka lakukan. Setelah sholat maka masjid-masjid ditutup dan dijaga ketat oleh para polisi.

Demikianlah kondisi Mesir dan Palestina yang menjadi tercerai berai karena kuatnya dukungan ekonomi dan sistem yang dibangun oleh bangsa Amerika dan Israel. Mereka tidak perlu turun langsung dalam meruntuhkan sendi-sendi bernegara, tetapi cukup hanya dengan menguasai dan mengendalikan sistem fundamental dalam bernegara, utamanya dalam aspek ekonomi.

Dalam asumsi penulis, dengan berkuasanya kembali kelompok militer, maka posisi Israel akan semakin kuat, dan pada waktu yang sama memperlemah posisi bangsa Palestina. Hal ini dikarenakan dukungan yang bisa diberikan oleh dunia Islam dan pergerakan masyarakat Palestina melalui Mesir akan semakin sulit karena aliansi yang kuat dari pemerintah Mesir dengan Israel dan Amerika. Pada waktu yang sama, dengan lemahnya kekuatan Ikhwanul Muslimin di Mesir, maka hal tersebut juga akan mempersulit gerak kelompok Hamas yang juga merupakan cabang IM di Palestina. Selain itu, kudeta Mesir juga mempunyai implikasi domino terhadap belahan dunia Islam lainnya sehingga memperlemah posisi dan komitmen mereka untuk perhatian dan berempati dengan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Palestina. Pada saat yang sama, Israel pun semakin kuat dan terus didukung oleh Amerika yang semakin optimal mendapatkan keuntungan dari perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah.



BAB 5

KESIMPULAN



Berdasarkan uraian yang disampaikan sebelumnya, maka terlihat jelas bahwa dua isu yang terjadi di dua negara yang berbeda, yaitu kudeta pemerintahan Mursi di Mesir dan konflik Israel Palestina mempunyai keterkaitan yang erat. Pasca kudeta Mursi, harapan keamanan yang semakin baik dalam kehidupan bernegara di Palestina menjadi suram. Padahal sebelumnya Mursi telah memberi secercah harapan karena komitmen awalnya untuk membela bangsa Palestina.

Dalam pandangan Mursi Mesir mempunyai keterikatan dalam beberapa aspek dengan Mesir baik dalam kaitannya dengan sejarah hubungan kedua negara sejak Nasser, kedekatan geografis, atau pun dalam hal ideologi ketika Mesir dikuasai oleh IM menjadi alasan utama pentingnya pembelaan terhadap bangsa Palestina dilakukan. Bangsa Palestina pun utamanya Hamas yang berada di Gaza dan berbatasan langsung dengan Mesir juga mempunyai harapan yang sama. Mereka menilai bahwa kemenangan IM dalam pemilu Mesir akan menjadi angin segar bagi perjuangan bangsa Palestina.

Namun kenyataannya, ketika hanya berselang satu tahun terjadi kudeta terhadap pemerintahan Mursi oleh militer, semua harapan tersebut hilang seketika. Mesir kembali dikuasai oleh militer yang tidak lebih merupakan kroni dari

pemerintahan Mubarak yang sudah lama bercokol dalam pemerintahan Mesir. Selama ini mereka sudah menikmati kekuasaan, dan mendapatkan banyak keuntungan, utamanya dukungan dana yang mereka dapatkan sebagai hasil aliansi dengan Amerika dan Israel. Mereka pun tidak mau keadaan tersebut segera berubah.

Karenanya wajar jika banyak yang menilai bahwa kudeta Mesir 2013 sebenarnya merupakan upaya untuk kembali kepada perjanjian Camp David yang menunjukkan komitmen kerjasama dan langgengnya upaya bersama yang dijalani oleh Mesir dan Israel, tentu dengan dukungan Amerika di belakangnya. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi dunia Islam, utamanya bangsa Palestina yang menjadi korban langsung.

Oleh karena itu, karena buku ini hanya fokus pada pengaruh kudeta Mesir 2013 terhadap stabilitas keamanan di Palestina, kiranya penting untuk dilakukan kajian lanjutan berkaitan dengan pengaruh kudeta Mesir terhadap stabilitas keamanan regional Timur Tengah. Dengan kajian lanjutan ini, diharapkan mampu membuka cakrawala yang lebih luas lagi dalam pembacaan sistem internasional, utamanya berkaitan dengan pola politik Amerika dan sekutunya Israel.



DAFTAR PUSTAKA



Article I. Anzalone, Christopher. 2013. *Egyptian Salafis Protest Warming Relations with Iran amidst Rising Regional Sectarian Tensions*. 9th April, <http://tahrirsquared.com/node/4057>

El Hassane, Aissa Lieutenant Colonel , *The Arab Spring: Causes, Consequences, and Implications*, diakses melalui <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA560779>.

Berg, Bruce L.. 2004. *Qualitative Research Methods for The Social Sciences* (Boston: Pearson Education

Bremmer, Ian. 2006. *The J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall* (New York: Simon & Schuster,).

Frisch, Hillel. Morsi's Egypt and Ahmadinejad's Iran: Much Ado Over Next to Nothing. BESA Center Perspectives Paper No. 196, February 10, 2013

Kerckhove, Ferry de. 2012. *Egypt's Muslim Brotherhood and the Arab Spring*. Canada: CDFAI. Hal 1.

- Lynch, Marc. 2011. *Obama's 'Arab Spring'*, diakses melalui http://www.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_arab_spring.
- Marinov, Nikolay And Hein Goemans. 2013. *Coups and Democracy*. 2013.B.J.Pol.S., Page 1 of 27 Copyright r Cambridge University Press
- Onians, Charles. *Supply and Demand Democracy in Egypt*. World Policy Journal, Vol. 21, No. 2 (Summer, 2004)
- Raus, Laura and John Pastrokos, "The Impact of Gulf Aid on Egypt's Economy", in *Egypt Oil and Gas*, No. 82 (October 2013), p. 14-15, http://www.egyptoil-gas.com/read_article_issues.php?AID=686
- Snyder, Jack. 2000. *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*. Jakarta: KPG
- Strauss, L dan Juliet Corbin. 1990. *Basics of Qualitative Research*. Sage Publication
- <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/201121125158705862.html>
- <http://www.almasryalyoum.com/news/details/123283>
- <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/egypt-1970-muslim-brothers.html#>
- <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/fall-egyptian-brotherhood-trouble-hamas.html>
- <https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/article/russia-and-egypt-old-relationship>
- <http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/terrorism-security/2013/1114/Egypt-s-message-to-the-US-We-ve-got-Russia>

<http://www.e-ir.info/2013/12/12/president-morsi-egypt-and-israel/>

<https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R43053.pdf>

<http://www.indybay.org/newsitems/2013/07/11/18739654.php>

<http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2013/07/24/177189.html>

<http://www.islammemo.cc/akhbar/locals-egypt/2013/07/11/176120.html>

<http://www.islammemo.cc/akhbar/locals-egypt/2013/07/16/176470.html>

http://www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/articles/Heineman-Atlantic-12-18-12.pdf

<https://www.lwbooks.co.uk/journals/soundings/pdfs/s54%20gerbaudo.pdf> page 105

<http://www.middleeastmonitor.com/news/americas/6554-us-documents-show-that-washington-funded-military-coup-in-egypt#sthash.RSxx9cyd.dpuf>

<https://www.middleeastmonitor.com/articles/africa/7727-why-is-israel-supporting-the-egyptian-coup>

<http://www.mythsandfacts.org/media/user/PLO-Agreement.pdf>

http://www.nytimes.com/2014/07/04/world/middleeast/palestinian-militants-and-israel-trade-attacks.html?_r=0

http://www.oii.ac.at/fileadmin/Unterlagen/Dateien/Publikationen/Egypt_in_Transition_current_analysis.pdf

Article II. <http://www.sfgate.com/opinion/openforum/article/In-the-name-of-democracy-U-S-works-against-Morsi-4742221.php>

http://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C35_gmm_rll.pdf

<http://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/egypt-us-support-for-military-coup/>

[http://thediplomat.com/2013/08/in-egypt-crisis-russia-sees-opportunity/.](http://thediplomat.com/2013/08/in-egypt-crisis-russia-sees-opportunity/)

<http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/10/egypt-coup-palestinians-morsi-gaza>

[http://www.thestar.com/news/world/2013/07/03/egypt_protests_mohammed_morsi_banned_from_travel_military_coup_underway_advisor_says.html;](http://www.thestar.com/news/world/2013/07/03/egypt_protests_mohammed_morsi_banned_from_travel_military_coup_underway_advisor_says.html)

<http://www.tradingeconomics.com/egypt/gdp-per-capita-ppp>
Egypt GDP per capita PPP

<http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/07/29/egypt-hamas-israel-peace/2587057/>

[http://www.voanews.com/content/washington-military-aid-to-egypt-serves-us-national-security-interests/1899925.html.](http://www.voanews.com/content/washington-military-aid-to-egypt-serves-us-national-security-interests/1899925.html)

https://www.youtube.com/watch?v=w58LsqrSYwA&feature=youtube_gdata_player



INDEKS



A

Adidaya, 3
Amerika, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 16, 17, 19, 21, 28, 30, 32,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53,
61, 62, 65, 67, 68, 70, 71, 72,
73, 76, 77
Anwar Saddat, 2, 19, 38, 53, 66

B

bumi, 6

D

demokratis, 1, 2, 19, 23, 24, 27, 39,
43, 44, 45, 46, 69, 72
demokratisasi, 1, 2, 14, 15, 23, 39,
44, 45
demonstrasi, 2, 3, 14, 33, 43

E

ekonomi, 3, 6, 14, 20, 21, 23, 24,
29, 32, 34, 36, 37, 50, 51, 53,
55, 57, 59, 62, 65, 72, 73

G

Gamal Abdul Naser, 2

H

Hamas, 4, 5, 7, 27, 30, 40, 42, 54,
55, 56, 57, 66, 67, 68, 69, 71,
73, 76
Husni Mubarak, 2, 16, 19

I

Ikhwanul Muslimin, 1, 3, 7, 16, 20,
25, 27, 32, 41, 42, 68, 73
intelijen, 5
Islamis, 4, 22, 24, 68, 70
Israel, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 19, 21,
38, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 75, 76, 77

J

Jenderal Abdul Fatah Al-Sisi, 1, 3

K

keamanan, 3, 8, 16, 19, 23, 35, 36,
37, 38, 44, 54, 55, 56, 57, 58,
71, 72, 75, 77
konstitusi, 2
Koptik, 3, 5
kudeta, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15,
16, 29, 38, 44, 45, 46, 47, 58,
64, 69, 72, 73, 75, 76, 77

L

Liberal, 3

M

Mesir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 52, 53, 58, 61, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 75, 76, 77
militer, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 29,
37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 61, 69, 71, 73, 76
Muhammad Mursi, 1, 2, 4
Muhammad Najib, 2

N

Nasrani, 3, 11

P

Pakistan, 1
Palestina, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 22,
27, 40, 49, 50, 51, 52, 54, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
75, 76, 77
pemilu, 1, 19, 23, 25, 27, 28, 44,
45, 46, 68, 76
pengungsi, 6
penjara, 5, 26, 29, 47
politik, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39,
40, 43, 44, 45, 51, 55, 57, 59,
60, 62, 67, 68, 71, 77
Presiden, 1, 4

R

Raja Faruq I, 2
Ramadhon, 6, 59
republik, 2

S

Sudan Selatan, 5
Syiah, 3, 34

T

tahanan rumah, 1
terorisme, 5, 27, 41, 61, 68
Timur Tengah, 1, 7, 11, 13, 14, 17,
22, 51, 52, 61, 67, 74, 77



PROFIL PENULIS



GONDA YUMITRO

Pernah belajar di Hubungan Internasional UGM dan *Political Science*, Jamia Millia Islamia dan *International Relations*, Annamalai University, India. Belajar agama dari beberapa ustadz ketika sedang studi di Yogyakarta, Malang dan India. Sekarang berprofesi sebagai dosen di prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

Mesir dan Palestina

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%